



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)



TAHUN 2018

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat -Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan LKPj Dinas ESDM tahun 2018 ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab melalui proses pengumpulan dan analisa informasi secara sistematis dan terukur, jelas, obyektif serta transparan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM tahun anggaran 2018.

LKPj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini berpedoman pada Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 masih ada kekurangan, namun harus diakui pula bahwa upaya-upaya tersebut telah memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Utara dan kami bertekad akan berusaha optimal dalam mendorong kinerja Dinas ESDM agar lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Tanjung Selor, 07 Februari 2019
KEPALA DINAS,

Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197302011998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum SKPD	1
1.2. Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
1.4. Isu Strategis	23
1.5. Program dan Kegiatan	27
BAB II EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN	30
2.1. Akuntabilitas Kinerja	30
2.2. Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah.....	62
BAB III PENUTUP	66
3.1. Kesimpulan	66
3.2. Saran.....	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah dibentuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Agar dalam melaksanakan urusan tersebut diatas dapat berjalan dengan baik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) harus menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu perencanaan yang matang, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah di lingkungan instansi Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dievaluasi melalui pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral. Untuk mengukur kinerja tersebut maka dibuatlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2018, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini juga dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan kinerja secara optimal dengan sumber daya yang memadai serta mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik agar dapat mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur dinas ESDM dijabarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2.1. Tugas Pokok :

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Geologi;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Mineral dan Batubara;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Energi Baru Terbarukan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Ketenagalistrikan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.3. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 1. Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 2. Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 3. Seksi Pengusahaan Air Tanah.
- d. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 1. Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara;

2. Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara;
 3. Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
1. Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan;
 3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Cabang Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas** Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
 - b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
 - e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - g. Mendistribusikan tugas kepada Unit Kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan program Unit Kerja di lingkungan Dinas berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretaris dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana program Sekretariat berdasarkan usulan Subbagian dan skala prioritas untuk bahan perumusan rencana kerja Sekretariat;

- c. Menyusun rencana pelaksanaan program Sekretariat berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretaris dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;

- c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi perencanaan yang meliputi penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian data dan informasi Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, Lakip sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal Unit Kerja di Lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk acuan dalam melaksanakan tugas;
- h. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- i. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi perencanaan dan keuangan;

- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja tahunan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- c. Melaksanakan pembinaan tata naskah dinas lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan dan membina kegiatan pengelolaan kearsipan;
- e. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor di lingkup Dinas;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan perawatan/perbaikan gedung/ruangan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan barang-barang daerah lainnya yang dikuasai oleh Dinas;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Dinas;
- j. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, pengembangan karir dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai di lingkup Dinas;
- k. Menyiapkan bahan untuk pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Asuransi Kesehatan para pegawai di lingkup Dinas;
- l. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan mengoordinasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) para pegawai di lingkup Dinas;
- m. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam rangka penyusunan LAKIP yang berkenaan dengan Dinas;

- n. Mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Membina, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktifitas kinerja serta pengembangan karir;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian atas persetujuan/sepengetahuan Sekretaris;
- r. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang geologi dan air tanah;
- b. Menyusun program dan kegiatan di bidang geologi dan air tanah yang meliputi inventarisasi geologi (eksplorasi/pemetaan), mitigasi bencana geologi, inventarisasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, serta air tanah dan geologi lingkungan;
- c. Merencanakan, melaksanakan dan Mengoordinasikan kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- d. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
- e. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- f. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi geologi, sumberdaya mineral dan batubara, serta air tanah dan geologi lingkungan;
- g. Melaksanakan mitigasi bencana geologi, inventarisasi dan pemetaan rawan bencana geologi;

- h. Melaksanakan pengelolaan air tanah dan mata air yang meliputi aspek inventarisasi, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian;
- i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan survei dan inventarisasi geologi, mitigasi bencana geologi, inventarisasi potensi sumberdaya mineral dan batubara, konservasi sumberdaya mineral dan batubara serta pengelolaan air tanah dan geologi lingkungan;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepada atasan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup bidang geologi dan air tanah berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil dan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah, pemetaan potensi sumber daya air tanah, daerah resapan air tanah, geologi lingkungan dan geologi teknik;
- f. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kawasan karst sebagai cagar alam geologi;

- g. Melaksanakan pemetaan dan inventarisasi geologi, sumber daya mineral dan batubara serta air tanah, energi non migas dan geologi lingkungan;
- h. Melakukan penyusunan peta-peta geologi, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah;
- i. Melakukan monitoring pada daerah bencana geologi;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pemetaan Geologi dan Air Tanah dan hasil monitoring pada daerah bencana geologi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7. Kepala Seksi Konservasi Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian, inventarisasi dan pengelolaan kawasan karst serta kawasan rawan bencana;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Air Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Konservasi Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian, inventarisasi Pengusahaan Air Tanah;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan Air Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Melakukan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pengusahaan Air Tanah di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Mineral dan Batubara dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;

- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bidang Mineral dan Batubara sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengusahaan Mineral dan Batubara, pembinaan pertambangan serta konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- e. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan pertambangan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis konservasi dan produksi Mineral dan Batubara;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Mineral dan Batubara di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing; Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Mineral dan Batubara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

10.Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah Izin Mineral dan Batubar berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Melakukan pemberian tanda batas wilayah dengan memasang pada patok Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi pertambangan;
- d. Melaksanakan inventarisasi neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara;
- e. Menyiapkan usulan penetapan wilayah pertambangan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelelangan wilayah izin usaha pertambangan mineral logam;
- g. Menyiapkan rekomtek perizinan pertambangan mineral non logam dan batuan wilayah I;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

11.Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perusahaan Mineral dan Batubara;
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi kegiatan RKAB dan RKTTL, eksplorasi serta studi kelayakan perusahaan;
- g. Memberikan rekomendasi teknis pemberian izin usaha pertambangan, mineral dan batubara;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Perusahaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perusahaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

12.Kepala Seksi Konservasi dan Produksi Mineral dan Batubara mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Konservasi dan Produksi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Melakukan pembinaan, penilaian serta mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai jabatannya dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi dan Produksi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian teknis konservasi pertambangan Mineral dan Batubara dan pelaksanaan pengembangan masyarakat (CD/CSR);
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang izin usaha pertambangan;

- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi dan Produksi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Konservasi dan Produksi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

13.Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan, pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan dan konservasi Energi dan Ketenagalistrikan;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan;

- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;

14. Kepala Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian ketenagalistrikan dan pengelolaan sistem informasi ketenagalistrikan serta pelayanan perizinan;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

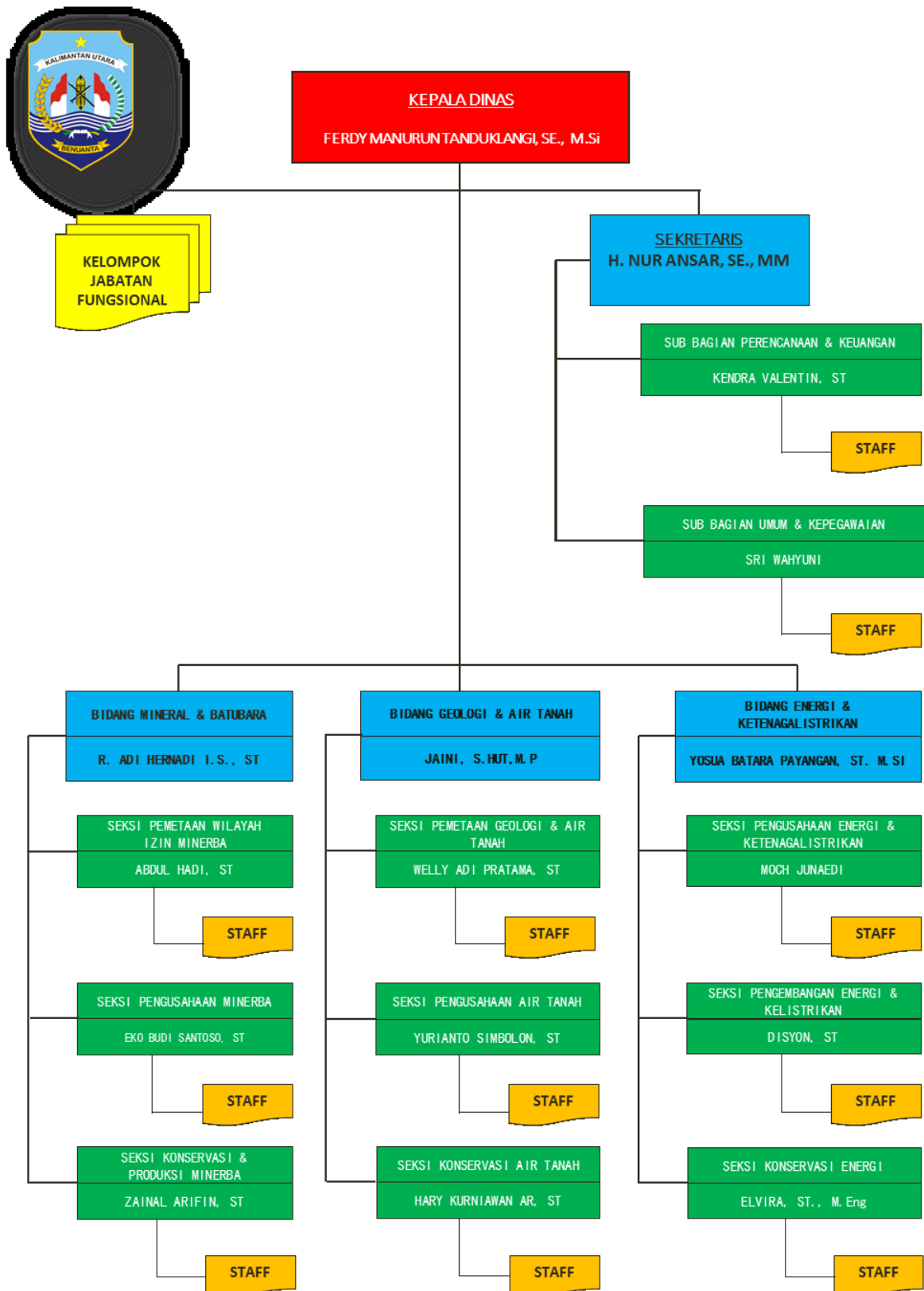
15.Kepala Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian potensi energi tak terbarukan, serta energi baru dan terbarukan;
- e. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- f. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16.Kepala Seksi Konservasi Energi mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, pengendalian pembinaan, inventarisasi pemanfaatan energi dan konservasi energi;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian bawahan sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- g. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Konservasi Energi dan Ketenagalistrikan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas ESDM



1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peran strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik pula. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis. Pemberdayaan pegawai sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara diantaranya melalui analisa jabatan, analisa kebutuhan pendidikan dan latihan, serta pendidikan dan latihan baik fungsional, struktural maupun teknis. Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan tahun 2018 berjumlah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) PNS dan 17 (tujuh belas) tenaga outsourcing/kontrak. Pegawai yang berstatus PNS kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon, dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian	Pegawai Tahun 2015		
		L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	28	11	39
2	Tenaga Kontrak	11	6	17
	Jumlah Pegawai	39	17	56

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan pangkat/Golongan Ruang Pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral.

Tabel 1.2
Pangkat/Golongan Ruang Pegawai

No	Pangkat	Gol/Ruang	Gol Pegawai Tahun 2018		
			L	P	Jumlah
I	Golongan IV		4	2	6
	Pembina Utama Madya	IV-d	-	-	-
	Pembina Utama Muda	IV-c	-	-	-
	Pembina tingkat I	IV-b	2	-	2
	Pembina	IV-a	2	2	4

II	Golongan III		22	6	28
	Penata Tingkat I	III-d	4	-	4
	Penata	III-c	3	1	4
	Penata Muda Tingkat I	III-b	4	2	6
	Penata Muda	III-a	11	3	14
III	Golongan II		2	3	5
	Pengatur Tingkat I	II-d	-	-	-
	Pengatur	II-c	2	3	5
	Pengatur Muda Tingkat I	II-b	-	-	-
	Pengatur Muda	II-a	-	-	-
IV	Golongan I				
		I-d			
		I-c			
		I-b			
		I-a			
	Jumlah		28	11	39

Berikut ini disajikan tabel berdasarkan kualifikasi pendidikan di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral :

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan/Jurusan	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		Jumlah Pegawai		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	3	1									4
	1. Magister Manajemen 2. Magister Administrasi Publik 3. Magister Ilmu Pemerintahan 4. Magister Engineering	1 1 1	1									
2	Sarjana (S-1)	2		19	3							24
	1. Teknik Geologi 2. Teknik Pertambangan 3. Teknik Elektro 4. Teknik Komputer 5. Teknik Lingkungan 6. Administrasi Negara 7. Geografi 8. Pertanian 9. Ekonomi 10. Ilmu Politik 11. Keuangan	1 1		5 8 2 1 1 2	2							
3	Sarmud / D3 1. Sarmud / Tambang 2. D3 / Ekonomi Perbankan 3. D3/ Kelistrikan			1 1	2 2	3 1 2						6

4	SLTA			1	2	1	1					5
	1. STM (Geologi/Tambang)											
	2. STM/Mesin											
	3. STM/Listrik			1								
	4. STM/Elektro											
	5. STM/Bangunan											
	6. STM/Teknologi Industri											
	7. SMA/IPA											
	8. SMA/IPS											
	9. SMAK/Analisis Kesehatan											
	10. SMEA/Tata Niaga				2	1	1					
	11. SMEA/Tata Usaha											
	JUMLAH KESELURUHAN	5	1	21	7	1	4					39

Sumber :SIMPEG DESDM 2018

1.4. Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

1.4.1 Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

Isu Strategis bidang mineral dan batubara adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, perumahan, dll. Disamping itu masih juga terdapat perusahaan di bidang minerba yang belum taat dan patuh kepada aturan. Secara umum, upaya untuk mengatasi isu strategis di bidang mineral dan batubara adalah :

1. Melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yang taat pada aturan yang berlaku untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB.

Pengelolaan Mineral adalah usaha pertambangan mineral yang telah dilakukan di Kalimantan Utara baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi,

Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang.

A. Kendala

- a. Masih banyaknya pertambangan yang belum taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.
- b. Banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

B. Peluang

- a. Potensi bahan tambang dan Sumber Daya Alam sangat besar, apabila diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dari perusahaan di bidang mineral dan batu bara maka mengurangi kesalahan-kesalahan perhitungan dari royalti yang diterima Negara dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat di kurangi.

1.4.2. Isu Strategis Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Isu strategis bidang ini adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Utara masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat, sekitar 38,94% masyarakat Kalimantan Utara belum menikmati listrik PLN, karena Rata-rata Rasio elektrifikasi Kalimantan Utara adalah 61,06%. Efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal. Potensi energi terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan.

Secara umum, penyediaan tenaga listrik dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara yang cukup besar.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti air, surya dan biomassa; berdasarkan inventarisasi, potensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Potensi energi air terbesar terdapat pada Sungai Kayan dengan potensi PLTA 6.080 MW, Sungai Sembakung dengan potensi PLTA 500 MW dan Sungai Mentarang dengan potensi PLTA 3.430 MW, selain itu terdapat potensi-potensi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang menyebar di daerah terpencil.
- Sebagai Negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m² setara dengan 112.000 GWp sepuluh kali lipat dari potensi Jerman dan Eropa. Untuk Kalimantan Utara intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata 2.889,43Wh/m² sampai dengan 3.293,39 Wh/m².

2. Meningkatkan Rasio elektrifikasi dan efisiensi penggunaan Listrik di Kalimantan Utara dan mempunyai Potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.

- Untuk Kalimantan Utara terbagi 2 usaha wilayah ketenagalistrikan terdiri dari Wilayah Usaha PT.PLN Tarakan dengan kapasitas daya terpasang 83,8 MW dengan daya mampu 66,95 MW dan beban puncak 39 MW sedangkan untuk wilayah PT.PLN (persero) terbagi 4 Rayon yaitu Rayon Nunukan, Rayon Bulungan, Rayon Tana Tidung dan Rayon Malinau dengan total kapasitas terpasang 72,133 MW dengan daya mampu 35.06 MW dan beban puncak 32,68 MW
- Rasio elektrifikasi Kota Tarakan 79%, Kabupaten Nunukan 65,5%, Kabupaten Bulungan 65,5 %, Kabupten Malinau 57,69 % dan Kabupaten Tana Tidung 40,14 %.

A. Kendala

- Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian energi terbarukan.
- Budaya hemat energi masih sulit diterapkan.
- Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) belum dapat bersaing dengan energi komersial.
- Pasar EBT masih terbatas.
- Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT kurang mendukung.

- Belum adanya peraturan perundangan yang memberikan insentif yang cukup untuk pengembangan energi alternative.
- Minat lembaga permodalan masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan infrastruktur energi.
- Harga jual energi listrik dari Energi baru Terbarukan masih belum kompetitif.

B. Peluang

- Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Utara besar, sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan.
- Masih banyak masyarakat dan industri masih memerlukan energi listrik.
- Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energi.
- Meningkatnya pengembangan energi alternatif.
- Pengembangan energi alternatif

1.4.2 Isu Strategis Bidang Geologi Dan Air Tanah

Isu strategis di bidang geologi dan air tanah adalah belum optimalnya pengelolaan usaha pemanfaatan air tanah sesuai kaidah konservasi demikian juga belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah yang sulit air.

1. Memanfaatkan 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.

Kalimantan Utara memiliki 1 Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Tanjung Selor yang melintasi 4 (empat) wilayah Kabupaten yaitu Kab. Tanjung Selor, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung dan Kab. Nunukan. Saat ini di Kalimantan Utara hanya ada 6 titik bor air tanah.

A. Kendala

- Kurangnya keesadaran masyarakat dalam pengelolaan air tanah dan metode perizinannya
- Masih banyaknya kegiatan pengambilan air tanah tanpa ijin.

B. Peluang

- Banyaknya pengambilan air tanah tanpa ijin sehingga mempunyai potensi untuk meningkatkan PAD daerah apabila sumur bor dari air tanah memiliki ijin semua.
- Potensi air tanah (1 CAT) dan cukup besar sehingga dapat di manfaatkan untuk kebutuhan air bersih dari air tanah

1.5. Program dan Kegiatan

Mengacu pada Tugas dan Fungsi SKPD serta dokumen perencanaan lainnya, Pada tahun 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 17.256.103.507,40 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.781.951.728,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.474.151.779,40 yang dijabarkan dalam 6 Program dan 29 Kegiatan sebagaimana terlihat pada table berikut ini :

Tabel 1.4
Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas ESDM Tahun 2018

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,781,951,728
5.1.1	Belanja Pegawai	5,781,951,728
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,814,351,728
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2,967,600,000
	BELANJA LANGSUNG	11,474,151,779
3.05 . . .3.05.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,595,747,897
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,600,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143,200,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	159,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,230,820,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48,400,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	202,992,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	517,481,200
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	563,654,697
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	146,000,000
3.05 . . .3.05.01.01 . 01 . 22	Penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi*	160,000,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
3.05 . . .3.05.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,200,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Motor Dinas	101,200,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35,000,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6,683,729,483.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16 . 01	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi Baru Terbarukan	187,434,400.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terk	225,649,260.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16 . 07	Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah	148,301,823.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16 . 19	Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan	240,400,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 16 . 37	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrkan dan EBT	5,881,944,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 22	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	676,269,999.70
3.05 . . .3.05.01.01 . 22 . 01	Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara	95,200,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 22 . 02	Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	138,912,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara	204,157,999.70
3.05 . . .3.05.01.01 . 22 . 17	Pembinaan dan Evaluasi K.3 Lingkungan Pertambangan	238,000,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . xx	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah	382,204,400.00
3.05 . . .3.05.01.01 . xx . 01	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah	174,058,000.00
3.05 . . .3.05.01.01 . xx . xx	Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah	208,146,400.00
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		17,256,103,507.40

BAB II

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Akuntabilitas Kinerja

2.1.1 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja. Data dan informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Analisis yang dilakukan disini berupa capaian atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output dan outcome serta mengevaluasi apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum, maka akan dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 terdapat sebanyak 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Berikut adalah data capaian kinerja tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Utara dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kontribusi sektor mineral dan batubara	Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan	48,94%	51,39%	105,00%
2	Meningkatnya penyediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	70,90%	71,98%	101,52%
3	Meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber	Persentase peningkatan	7,53%	7,60%	100,93%

	dari air tanah	desa/kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah			
--	----------------	---	--	--	--

Berikut ini adalah perhitungan realisasi dari target kinerja, yaitu :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan} &= \text{IUP patuh} / \text{total jumlah IUP} \times 100\% \\
 &= 37 / 72 \times 100\% \\
 &= 51,39\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Kaltara)

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Rasio elektrifikasi} &= \text{Jumlah KK dialiri listrik} / \text{Jumlah total KK} \times 100\% \\
 &= 126.702 / 176.023 \times 100\% \\
 &= 71,98\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov. Kaltara))

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Persentase peningkatan desa / kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah} &= \text{Jumlah desa yang mendapatkan air bersih dari air bawah tanah} / \text{jumlah total desa berpotensi mendapatkan air bersih dari air bawah tanah} \times 100\% \\
 &= 34 / 447 \times 100\% \\
 &= 7,60\%
 \end{aligned}$$

(Sumber data : Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Prov. Kaltara)

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi sektor mineral dan batubara	Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap	653.450.967,00	96,63%

		peraturan		
2	Meningkatnya penyediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	6.198.683.659,00	92,74%
3	Meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah	Persentase peningkatan desa/kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah	343.250.526,00	89,81%
Total			7.195.385.152,00	92,94%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase realisasi keuangan Dinas ESDM adalah sebesar 92,94%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dinas ESDM sudah sangat baik dalam hal pelaksanaan anggaran.

1. Analisis hambatan dan upaya yang sudah dilakukan terkait pencapaian yang sudah ada di perjanjian kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal/eksternal
- b. Pimpinan
- c. Sumber daya manusia
- d. Kreatifitas, inovasi dan motivasi
- e. Imbalan/pendapatan
- f. Kebijakan
- g. Rasionalisasi

Beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas ESDM;
- b. Adanya silpa anggaran yang disebabkan oleh sisa/selisih antara anggaran di DPA dengan hasil penawaran;

- c. Belum adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pencairan anggaran kegiatan sehingga terjadi ketidaksinkronan;
- d. Kurangnya pemahaman pegawai terkait konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan serta pencairan dana kegiatan;
- e. Adanya keterbatasan anggaran;
- f. Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi yang bersinggungan langsung dengan Dinas ESDM;
- g. Masih ada pengusaha yang tidak disiplin dalam mentaati peraturan yang ada.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, adapun rencana tindak lanjutnya antara lain :

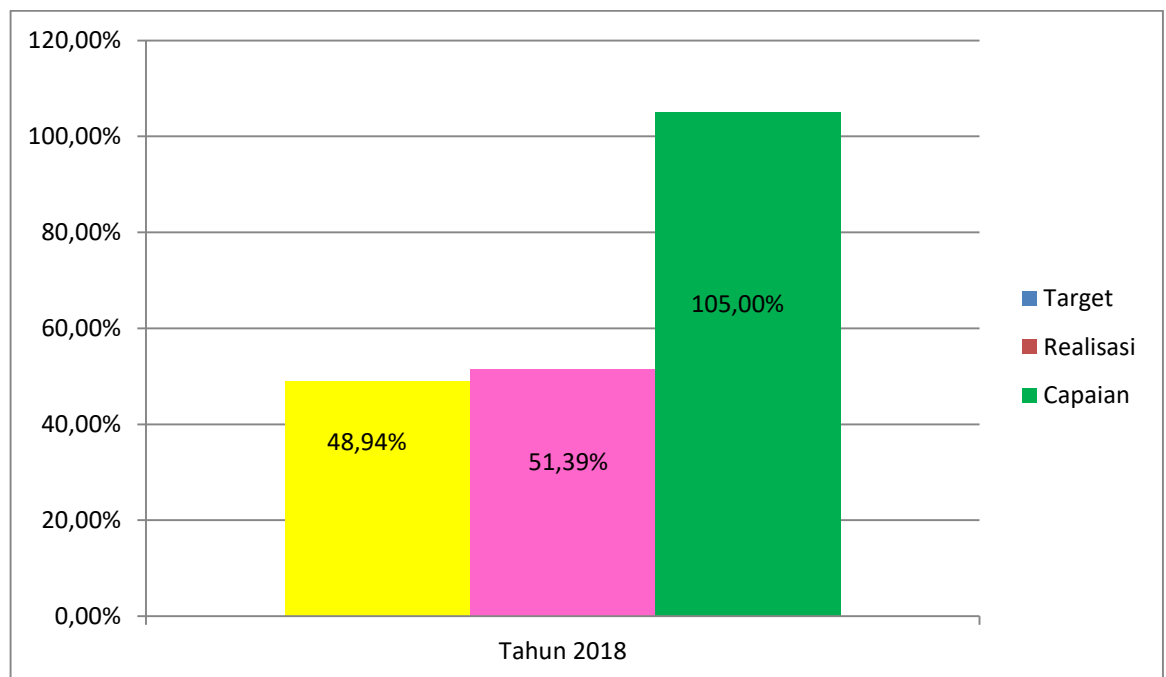
- a. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kuota kebutuhan pegawai di Dinas ESDM serta meningkatkan kualitas ESDM dengan mengikutkan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tugasnya;
- b. Menyusun RKA tahun 2019 yang sesuai dan tepat sasaran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan target kinerja;
- c. Meningkatkan pemahaman pegawai terkait perencanaan, pelaksanaan serta pencairan anggaran TA 2019;
- d. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dijalankan sehingga anggaran yang tersedia digunakan secara tepat serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya;
- e. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi serta menjalin hubungan yang baik dengan instansi lain yang bersinggungan langsung dengan Dinas ESDM;
- f. Memberikan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak taat pada peraturan.

2. Analisis Capaian Kinerja Dinas ESDM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dilihat capaian kinerja dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kontribusi sektor mineral dan batubara Kinerja 1 : Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor mineral dan batubara adalah persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan. Indikator kinerja ini dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebesar 48,94% dan terealisasi 48,68%, sehingga capaian kinerja indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah sebesar 99,48% dan masuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.1 Capaian Kinerja Jumlah Persentase Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Peraturan

Capaian kinerja pada indikator persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

Sub sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga peran Pemerintah yang sangat

dibutuhkan saat ini adalah membuat kebijakan yang mengatur mineral dan batubara tidak hanya memanfaatkan kekuatan ekonomi neoklasik yaitu untuk mencapai keseimbangan pasar, tetapi lebih dari itu konstruksi teoritisnya dengan memasukkan isu-isu yang mendasar bagi keberlanjutan. Kontrol dari Pemerintah sangat diperlukan dalam produksi mineral dan batubara Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama kegiatan pertambangan yang menggunakan metode tambang terbuka (open pit mining). Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan struktur bentang alam dan gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Hal ini terutama karena bahan galian yang akan ditambang berada dibawah permukaan tanah, sehingga perlu dilakukan pengupasan tanah atau batuan penutupnya (overburden). Dampaknya adalah terjadinya penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna (keanekaragaman hayati), terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim maupun peningkatan polusi.

Banyak hal yang perlu mendapatkan penanganan yang serius, mulai dari pola investasi, kebutuhan pasar, persyaratan lingkungan, kemampuan teknologi, sumber daya manusia, hingga regulasi dan keterkaitan dengan antar sektor/institusi lainnya. Komitmen semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam hal pengelolaan pertambangan untuk memberikan manfaat (benefit) ekonomi maksimal bagi penerimaan Negara dan efek berganda bagi perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan selama penambangan dan pasca tambang.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat menjadi permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk pertambangan-pertambangan tanpa izin untuk mengurus perizinan

2. Belum terwujudnya pengelolaan serta pemanfaatan bahan galian secara optimal
3. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang belum optimal
4. Dibatasiya kouta produksi batubara oleh pemerintah pusat
5. Belum optimalnya pemenuhan produksi batubara untuk pasar domestik (DMO)
6. Penyampaian laporan produksi dan penjualan mineral dan batubara secara bulanan belum optimal
7. Masih adanya tunggakan piutang PNBK baik untuk iuran tetap maupun royalti
8. Pendataan realisasi pelaksanaan kegiatan CSR pemegang IUP dari rencana kerja perusahaan tahun 2018 belum maksimal
9. Laporan pelaksanaan rencana reklamasi maupun pascatambang yang wajib disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan setiap tahun belum maksimal
10. Penyusunan rencana reklamasi maupun pascatambang beberapa belum disampaikan, terutama untuk IUP mineral non logam atau batuan
11. Perubahan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dari pemerintah kabupaten / kota ke pemerintah provinsi belum maksimal

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan wilayahnya. Dalam pelaksanaan kewenangan ini keterbatasan aparat pemerintah daerah menyebabkan terjadi praktek pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pada wilayah pertambangan. Untuk mengurangi dampak kerusakan maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha pertambangan yang dilakukan secara administratif dan teknis operasional.

Hingga akhir tahun 2018, Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 72 IUP terdiri dari 2 IUP

Mineral logam (emas), 30 IUP Batubara dan 40 IUP Batuan. Sedangkan jumlah IUP yang patuh terhadap peraturan adalah 37 IUP.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Izin Tambang

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah IUP di Kalimantan Utara	72
2	IUP patuh	37

Presentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan

$$\frac{\text{IUP patuh}}{\text{Jumlah IUP di Kalimantan Utara}} \times 100\% = \frac{37}{72} \times 100\% = 51,39\%$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase kepatuhan pemegang IUP terhadap peraturan adalah program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Mineral dan Batubara selama tahun 2018, antara lain :

a. Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sampai akhir tahun 2018, terdapat 32 IUP Mineral logam dan Batubara, 40 IUP Mineral non logam dan batuan serta 4 IUP operasi produksi penjualan. Adapun hasil penataan IUP pada tahun 2018 menghasilkan :

- 7 IUP Mineral logam dan batubara telah berakhir masa berlakunya dan telah diterbitkan SK pengakhirannya
- 3 IUP dicabut

b. Penerbitan rekomendasi teknis perizinan bidang mineral dan batubara

Pada tahun 2018, ada 3 rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas ESDM terkait peningkatan IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi untuk mineral logam dan batubara, 1 rekomendasi teknis terkait perpanjangan IUP batubara, 5 rekomendasi teknis terkait Izin Usaha Jasa

Pertambangan (IUJP) dimana 1 rekomendasi teknis terkait IUJP sedang dalam proses, 4 rekomendasi teknis terkait penghentian sementara IUP mineral logam dan batubara dimana 2 rekomendasi teknis telah diterbitkan dan 2 sedang dalam proses, serta 1 rekomendasi teknis terkait perubahan direksi dan/atau komisaris.

c. Pemberian persetujuan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2018 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2018, terdapat 32 perusahaan pemegang IUP yang telah menyampaikan dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan dan telah ditetapkan jumlah kuota produksi batubara yang diberikan untuk perusahaan pemegang IUP operasi produksi batubara yang ada di Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 13.036.310 ton batubara.

d. Pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2018 (RKAB)

Berdasarkan hasil persetujuan RKAB 2019, terdapat 32 perusahaan yang telah menyampaikan dokumen RKAB dan telah mendapatkan persetujuan, sementara untuk kuota produksi batubara tahun 2019 di Kalimantan Utara masih menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

e. Kegiatan pengawasan terpadu

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Tarakan dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah Membina Pengusaha Izin Usaha Pertambangan Minerba yang ada di Kalimantan Utara agar dapat memperhatikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan kaidah-kaidah teknis pertambangan yang baik terutama terhadap lingkungan,

2. Memperhatikan kewajiban-kewajiban seperti royalty, iuran tetap, jaminan reklamasi dan pascatambang.
 3. Pelaporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
 4. Mensosialisasikan peraturan menteri yang baru seperti permen 11, 22, 25 dan 26 tahun 2018.
- f. Melaksanakan kegiatan pra-rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan pra-rekonsiliasi PNBP pada tahun 2018 dilaksanakan per-triwulan dengan tujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan realisasi produksi maupun pemasaran minerba serta untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan perusahaan pemegang IUP dalam melakukan pembayaran PNBP. Berikut ini adalah data yang diperoleh :

1. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan pertama, (periode 01 Desember 2017 s.d. 16 April 2018) yaitu :

Tabel 2.4
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan I

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	146,897.21	260.744.484,00
Royalti	13,969,666.86	4.904.767.249,00
Penjualan Hasil Tbg	921,139.51	5.557.801.665,00
JUMLAH	15,037,703.58	10.723.313.398,00

2. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan kedua, (periode 01 April s.d. 30 Juni 2018) yaitu :

Tabel 2.5
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan II

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	22,240.00	---
Royalti	6,631,463.00	4.518.882.319,00
Penjualan Hasil Tbg	689,629.00	4.237.882.784,00

JUMLAH	7,073,332.00	8.756.765.103,00
--------	--------------	------------------

3. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan ketiga, (periode 01 Juli s.d. 28 September 2018) yaitu :

Tabel 2.6
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan III

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	34,134.38	---
Royalti	11,272,960.54	3.645.167.288,00
Penjualan Hasil Tbg	184,034.35	3.169.344.083,00
JUMLAH	11,491,129.27	6.814.511.371,00

4. Kegiatan pra rekonsiliasi triwulan keempat, (periode 01 Oktober s.d. 29 November 2018) yaitu :

Tabel 2.7
PNBP Kalimantan Utara hasil kegiatan prarekonsiliasi triwulan IV

KETERANGAN	PENERIMAAN (USD)	PENERIMAAN (Rp)
Iuran Tetap	119,126.80	192.916.267,00
Royalti	8,041,791.70	6.717.992.335,50
Penjualan Hasil Tbg	---	---
JUMLAH	3.832.919,89	6.910.908.602,50

- g. Mengikuti kegiatan rekonsiliasi PNBP

Kegiatan rekonsiliasi PNBP dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dengan tujuan mengidentifikasi dan merekonsiliasi PNBP periode 02 Januari 2018 – 05 Desember 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.8
PNBP Kalimantan Utara hasil rekonsiliasi PNBP tahun 2018

Keterangan	Hasil Pencatatan (02 Jan. s.d. 4 Des. 2018) (Rp)	Hasil Pencatatan (5 Des. 2018) (Rp)	Jumlah (Rp)
Iuran Tetap	7.303.724.041,00	1.688.668.001,00	8.992.392.042,00
Royalti	645.983.323.107,00	44.171.862.775,00	690.155.185.882,00
Penjualan Hasil Tambang	200.825.062.658,00	12.320.991.728,00	213.146.054.386,00
Jumlah	854.112.109.806,00	58.181.522.504,00	912.293.632.310,00

h. Kegiatan prarekonsiliasi produksi dan pemasaran

Kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang dihadiri oleh pemegang IUP tahap operasi produksi mineral dan batubara di Kalimantan Utara. Adapun data realisasi produksi dan pemasaran sebagai berikut :

Tabel 2.9
Data Realisasi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara

No	Komoditas	Produksi	Penjualan
1	Batubara (Ton)	21.590.968,58	20.023.731,44
2	Emas (Kg)	63.808,41	66.866,00

i. Kegiatan evaluasi pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO)

Pemenuhan DMO sebesar 25 % sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 1924 K/30/MEM/2018, wajib dilaksanakan oleh setiap pemegang IUP operasi produksi yang telah melakukan kegiatan produksi serta pemasaran mineral dan batubara. Dalam rangka sosialisasi terkait dengan peraturan tersebut, pihak Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Mineral dan Batubara telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan pertambangan batubara. Dari hasil pertemuan dimaksud, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan batubara yang berada di Kalimantan Utara, dimana kualitas batubara dari beberapa perusahaan tidak masuk dalam kualifikasi yang diinginkan oleh PT. PLN (terutama kadar sulphur dan kalori).

Tabel 2.10
Pemenuhan DMO Batubara 2018

KEGIATAN	2017
Target DMO (ton)	2.413.750,00
Realisasi DMO (ton)	1.813.443,66
Capaian DMO	75,13%

- j. Kegiatan Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana yang diatur dalam Kepmen ESDM nomor : 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM. Kegiatan penyusunan cetak biru ini bekerja sama dengan pihak Yayasan Prakarsa Borneo di Balikpapan, selain itu penyusunan cetak biru PPM juga telah dikoordinasikan dengan Ditjend. Minerba (Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara).

Tujuan dari penyusunan cetak biru dalam rangka untuk mengetahui kebijakan PPM di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari segi perencanaan pembangunan pengembangan dan pemberdayaan manusia yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan yang sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal. Selain itu dengan Cetak Biru Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disusun diharapkan akan menjadi panduan bagi badan usaha pertambangan dalam menyusun rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan masing-masing.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan blue print pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan pertemuan “ Rembug Bersama “ Strategi Penyusunan Blue Print PPM, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Hotel DC Mega Tanjung Selor – Jalan Sengkawait. Pertemuan ini

bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba, Sub Direktorat Hubungan Komersial Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), Bandung serta Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Provinsi Kalimantan Utara dan badan usaha pertambangan

2. Konsolidasi kembali untuk mempercepat penyusunan blue print PPM yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Tarakan. Dengan adanya kegiatan ini bertujuan adanya progress dari rencana penyusunan Cetak Biru Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat, sehingga diharapkan akan menjadi panduan bagi badan usaha pertambangan dalam menyusun rencana induk (RI) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) di lingkungan perusahaan masing-masing
3. Melaksanakan sosialisasi rancangan penyusunan cetak biru PPM pada tanggal 26 November 2018 di Tarakan. Kegiatan ini dihadiri dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjend. Minerba (Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara), Dinas / Instansi terkait se Kalimantan Utara dan para pemegang IUP operasi produksi
4. Finalisasi rancangan penyusunan cetak biru PPM yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta sesuai dengan norma dan budaya kearifan lokal.

k. Pengawasan penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan pasca tambang

Pelaksanaan koordinasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap pemegang izin usaha pertambangan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari seksi Konservasi dan Produksi. Pelaksanaan reklamasi maupun pascatambang oleh para pelaku izin usaha pertambangan, sesuai peraturan dibidang mineral dan batubara adalah suatu kewajiban bagi setiap pemegang IUP baik saat tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Bentuk dari pelaksanaan kewajiban tersebut, berupa penyusunan dan pembuatan dokumen

reklamasi maupun pascatambang, serta penempatan jaminan reklamasi atau pascatambang. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ini, berupa evaluasi terhadap laporan reklamasi atau pascatambang. Hasil pengawasan perusahaan yang sudah melakukan kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang berdasarkan data akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Rekapitulasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang
Provinsi Kalimantan Utara

REKAPITULASI JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBAANG			
PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
(s.d. TAHUN 2018)			
NO.	URAIAN	JUMLAH	
		Rp.	USD
I.	JAMINAN REKLAMASI TAHAP OPERASI PRODUKSI	99.191.669.545,23	4.245.810,26
II.	JAMINAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI	306.544.921,29	-
III.	JAMINAN PASCATAMBAANG	11.276.731.393,72	2.820.016,08
TOTAL		110.774.945.860,24	7.065.826,34

I. Penyusunan database mineral dan batubara

Kegiatan-kegiatan yang mendukung penyusunan database mineral dan batubara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan survey harga (lokasi tambang komoditas mineral bukan logam dan batuan) ke 5 Kabupaten / Kota se - Kaltara dalam rangka penetapan harga pasar patokan penjualan komoditas mineral bukan logam dan batuan. Output kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai harga jual komoditas mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh masing-masing pengusaha di wilayah kerjanya. Dengan tersedianya data-data harga menjadi modal dasar dalam penentuan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang nantinya akan ditetapkan melalui SK atau Peraturan Gubernur yang berlaku bagi masing-masing wilayah diseluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara
2. Menyiapkan rekomendasi teknis (rekomtek) perizinan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pemberian rekomendasi teknis (rekomtek) telah dilakukan untuk beberapa pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral bukan logam dan batuan di 5

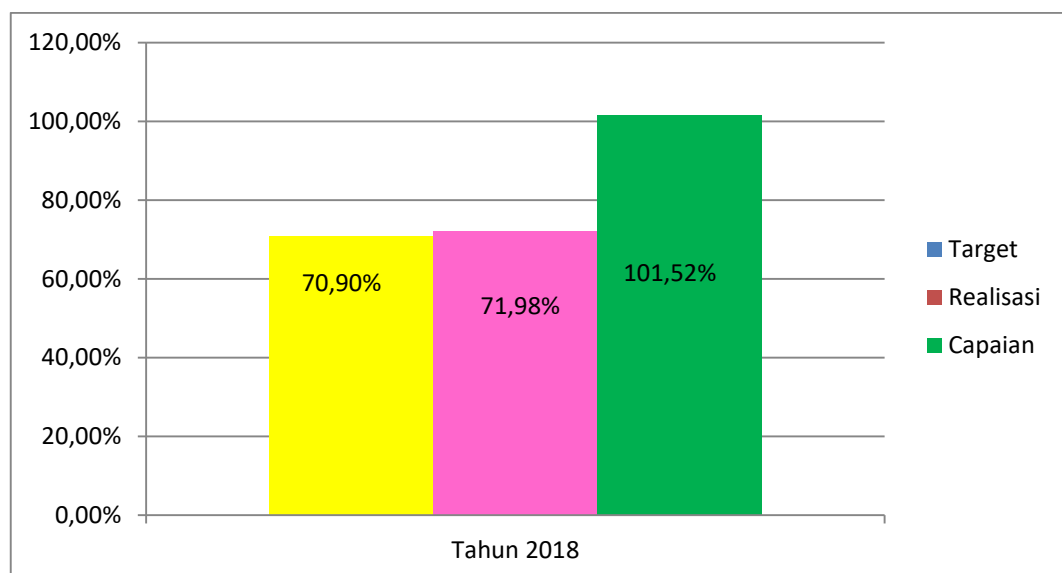
(lima) Kabupaten / Kota se-Kaltara dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin bidang mineral dan batubara, kegiatan berlangsung hingga akhir tahun anggaran mengingat potensi permohonan izin pertambangan di Provinsi Kaltara masih akan terus berdatangan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya berita acara peninjauan lapangan yang memuat kondisi real di areal yang dimohonkan oleh pengusaha dan kelengkapan data-data administrasi yang wajib diisi oleh pengusaha. Persetujuan pertimbangan teknis dan draft SK WIUP / IUP Eksplorasi / Operasi Produksi untuk diteruskan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

3. Melakukan pengecekan dan penegasan pemasangan tanda / patok batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan memprioritaskan wilayah yang berhimpitan langsung dengan wilayah izin usaha pertambangan yang lain. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya berita acara peninjauan lapangan tentang pemasangan patok batas. Persetujuan resmi (SK Gubernur / Kepala Dinas) tentang letak batas wilayah izin usaha pertambangan yang ditandai dengan adanya patok berstandar nasional yang telah dijelaskan dalam Kepmen ESDM nomor 1825
4. Melakukan pencatatan neraca sumber daya dan cadangan komoditas mineral dan batubara setiap perusahaan yang berizin. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya data sumber daya dan cadangan hasil eksplorasi yang dilengkapi dengan pernyataan CPI agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data sumber daya dan cadangan yang telah direkap dari setiap perusahaan yang melaporkan dokumen Studi Kelayakan atau Laporan Eksplorasi yang mana data-data ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui kekayaan alam Indonesia khususnya Kalimantan Utara sepanjang tahun berjalan.
5. Buku Minerba Dalam Angka yang akan dicetak merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan diselesaikan oleh seluruh seksi di bidang minerba yang memuat resume akhir kegiatan seksi. Buku ini akan dicetak sebanyak 10 buah. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan dalam bentuk buku yang

memuat informasi tentang seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

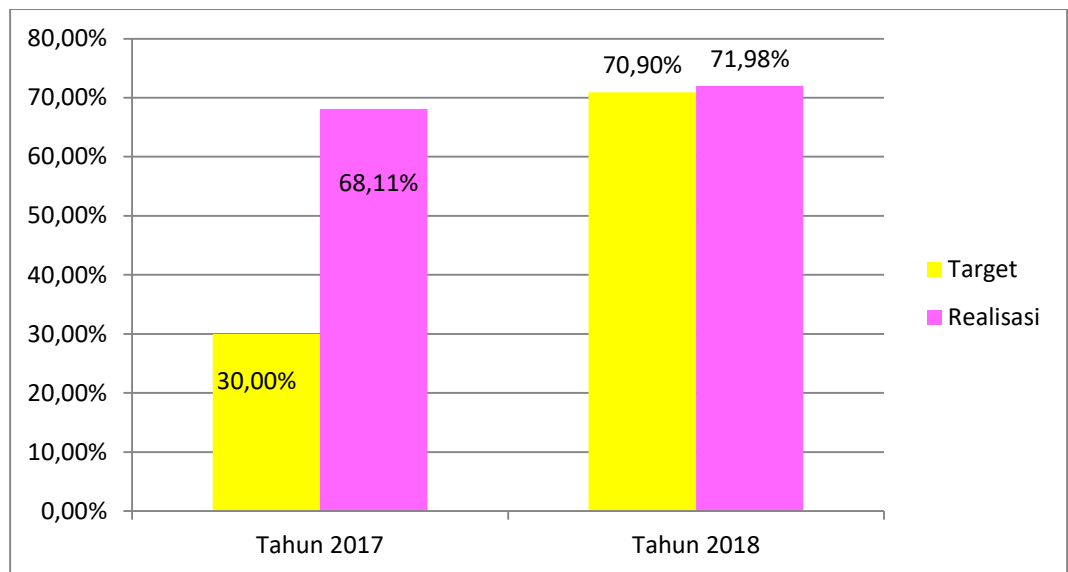
b. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penyediaan Energi Listrik pada Indikator Kinerja 2 : Rasio Elektrifikasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya penyediaan energi listrik adalah rasio elektrifikasi. Indikator ini tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2018, rasio elektrifikasi ditargetkan sebesar 70,90% dan terealisasi pada akhir tahun 2018 sebesar 70,92% sehingga capaian kinerja indikator rasio elektrifikasi sebesar 100,03% termasuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.2 Rasio Elektrifikasi

Perbedaan capaian kinerja pada indikator rasio elektrifikasi tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017, indikator rasio elektrifikasi yang tercapai adalah sebesar 68,11% sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 71,98% dengan capaian sebesar 105,68% sehingga dapat dikategorikan berhasil sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.3 Perbandingan Rasio Elektrifikasi Tahun 2017 dan Tahun 2018

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang sangat berperan penting dalam rangka pembangunan ekonomi dan social. Ketersediaan listrik yang mencukupi, andal serta dengan harga yang terjangkau merupakan pasokan penting dalam menghasilkan barang dan jasa, selanjutnya diharapkan dengan adanya listrik akan mengubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian akses listrik di provinsi Kalimantan Utara belum merata, hal ini dapat terlihat dari belum seluruh desa di provinsi Kalimantan Utara yang menikmati listrik.

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Jumlah keseluruhan desa di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 483 desa (sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2017). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih sangat diharapkan perannya dalam upaya penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat desa. Untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PT. PLN (Persero), maka sangat diperlukan pembangkit energi skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi listrik di desa-desa tersebut.

Secara sederhana, rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga (RT) / kepala keluarga (KK) yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga (RT) / kepala keluarga (KK) yang ada. Ratio

elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 71,98 %.

Rasio Elektrifikasi

$$\frac{\text{Jumlah KK dialiri listrik}}{\text{Jumlah total KK}} \times 100\% = \frac{126.702}{176.023} \times 100\% = 71,98\%$$

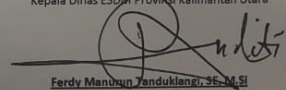
Tabel di bawah ini merupakan gambaran jumlah total KK berlistrik dan jumlah total KK yang ada di provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.12

No	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Desa/ Kelurahan	KK	Penduduk	Desa Berlistrik			Jumlah Desa Belum Berlistrik	RT/KK Berlistrik			Jumlah KK Belum Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik (8:3)X100%	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK berlistrik (12:4)X100%	Ket.
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	Non PLN	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	13	14=(8:3)X100%	15=(12:4)X100%	16
1	KABUPATEN BULUNGAN	81	34.886	140.870	43	1	44	37	26.229	269	26.498	8.388	54,32%	75,96%	
2	KOTA TARAKAN	20	59.049	253.026	20	0	20	0	48.733	0	48.733	10.316	100,00%	82,53%	
3	KABUPATEN NUNUKAN	240	53.895	208.426	63	35	98	142	32.240	2.312	34.552	19.343	40,83%	64,11%	
4	KABUPATEN MALINAU	109	20.644	78.102	32	28	60	49	11.409	1.709	13.118	7.526	55,05%	63,54%	
5	KABUPATEN TANA TIDUNG	32	7.549	26.892	17	0	17	15	3.801	0	3.801	3.748	53,13%	50,35%	
TOTAL		482	176.023	707.316	175	64	239	243	122.412	4.290	126.702	49.321	49,59%	71,98%	

Keterangan :
RT = Rumah Tangga
KK = Kepala Keluarga

1. Sumber data kependudukan : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018
2. Kategori desa berlistrik : Rasio Elektrifikasi desa di atas 50 %

Tanjung Selor, 2 Januari 2019
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara

Ferdys Mardiana Zanduklan, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19730201 199803 1 005

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator rasio elektrifikasi adalah program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Energi dan Ketenagalistrikan selama tahun 2018, berikut ini adalah perkembangan pembangunan sektor infrastruktur energi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu :

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan sebesar 900 MW oleh PT. Kayan Hidro Energi (KHE) akan dimulai proses kontruksinya pada bulan Februari 2019. Pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Ruang Kerja Kepala Staff Kepresidenan telah ditandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara PT.

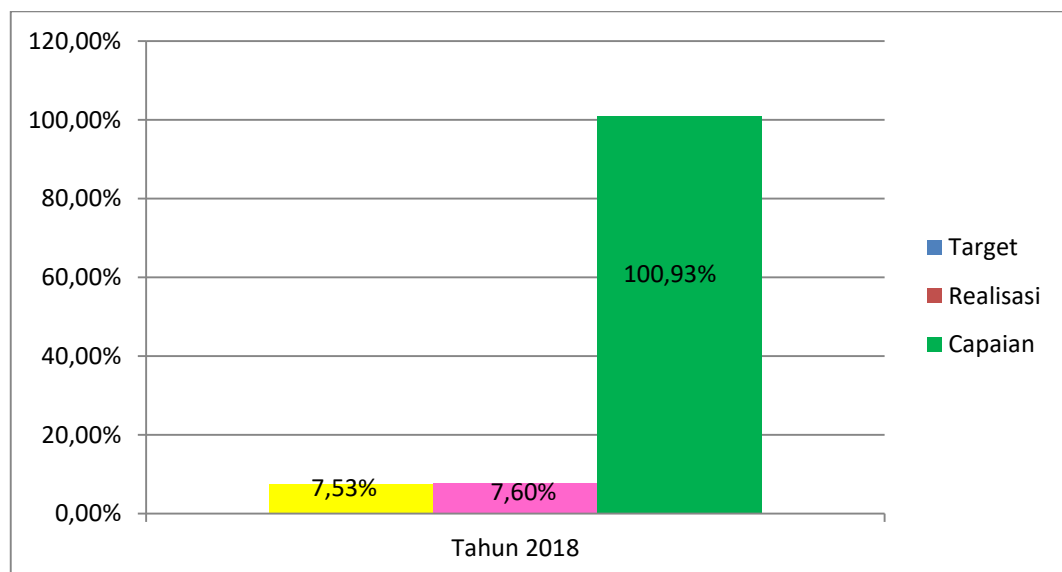
KHE dengan Power China International Group Limited selaku kontraktor pelaksana.

- b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dengan kapasitas 40 kWp di Dusun Tias, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan pembangunan PLTS Terpusat telah selesai pada akhir Desember 2018, dan telah melistriki 231 Kepala Keluarga. Pendanaan pekerjaan pembangunan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018.
- c. Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kabupaten Malinau kepada 275 Kepala Keluarga di Kecamatan Sungai Tubu (Desa Long Nyau, Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu), Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Desa Punan Long Adiu, Desa Long Adiu) dan Kecamatan Mentarang Hulu (Desa Long Semau, dan Desa Long Berang).
- d. Progres konstruksi transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sampai triwulan keempat tahun 2018 :
 - 1. SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Tanjung Selor section 1 : 41,09 %
 - 2. SUTT 150 kV Tanjung Redeb – Tanjung Selor section 2 : 38,46 %
 - 3. SUTT 150 kV Tideng Pale – GI Malinau section 1 : 23,11 %
 - 4. SUTT 150 kV Tideng Pale – GI Malinau section 2 : 17,82 %
- e. Progres konstruksi Gardu Induk sampai dengan triwulan keempat tahun 2018:
 - 1. Gardu Induk 150 kV Tanjung Selor : telah selesai dan sudah di energize.
 - 2. Gardu Induk 150 kV Tideng Pale : 100 % (belum dienergize)
 - 3. Gardu Induk 150 kV Malinau : telah selesai dan sudah di energize.
- f. Progres konstruksi pembangkit sampai dengan triwulan keempat tahun 2018):
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Malinau dengan kapasitas 2 x 3 MW : 68,12 %
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Selor dengan kapasitas 2 x 7 MW : 62,44 %

3. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tanjung Selor dengan kapasitas 15 MW : 80,45 %
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nunukan 2 dengan kapasitas 10 MW : 24,20 %
- g. Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Kabupaten Nunukan :
1. Jaringan Listrik Perdesaan di Desa Sakaduyantaka, Kecamatan Seimenggaris:
 - Panjang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) : 11,02 kms
 - Panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) : 11,18 kms
 - Kapasitas Trafo : 4 x 50 kVA
 - Potensi Pelanggan : 1.076
 - Progress Pekerjaan : Tahap finalisasi
 2. Jaringan Listrik Perdesaan di Desa Binanun, Desa Pulau Keras, Desa Liuk Bulu, Desa Lubok Buat, Desa Katul, Desa Saduman, Desa Mambulu, Desa Pagaluyon, dan Desa Tulang, Kecamatan Sembakung Atulai:
 - Panjang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) : 10,88 kms
 - Panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) : 36,63 kms
 - Kapasitas Trafo : 7 x 100 kVA
 - Potensi Pelanggan : 1.099
 - Progress Pekerjaan : Penarikan Kabel
 3. Jaringan Listrik Perdesaan di Desa Bebanas, dan Desa Melasu Baru, Kecamatan Sebuku:
 - Panjang Jaringan Tegangan Rendah (JTR) : 9,20 kms
 - Panjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) : 15,57 kms
 - Kapasitas Trafo : 1 x 50 kVA, 2 x 100 kVA
 - Potensi Pelanggan : 201
 - Progress Pekerjaan : Pendirian Tiang

c. **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih yang Bersumber dari Air Tanah pada Indikator Kinerja 3 : Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Air Bersih dari Air Tanah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran strategis meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah adalah persentase peningkatan desa/kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah. Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2018, persentase peningkatan desa/kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah ditargetkan sebesar 7,53% dan terealisasi sebesar 7,60% pada akhir tahun 2018 sehingga capaian kinerja indikator persentase peningkatan desa/kelurahan yang mendapatkan air bersih dari air tanah sebesar 100,93% termasuk dalam kategori **sangat baik** sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2.4 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Air Bersih dari Air Tanah

Capaian kinerja pada indikator cakupan penyediaan air bersih tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara.

Meningkatnya ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah ditargetkan untuk menyediakan sumber air bersih dalam bentuk pembuatan

sumur bor bagi masyarakat di daerah yang sulit mendapatkan air bersih. Pada tahun 2018, tidak ada kegiatan pembangunan sumur bor yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kalimantan Utara namun, ada pembangunan 12 (lima belas) titik sumur bor yang bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) walaupun sampai sekarang progress pembangunan sumur bor tersebut belum ada informasi lebih lanjut. Lokasi pembangunan sumur bor tersebut ada pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13 Lokasi Pembangunan Sumur Bor Menggunakan APBN

Kalimantan Utara	Bulungan	Tanjung Palas	Antutan
	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning
	Bulungan	Tanjung Palas Timur	Wono Mulyo
	Bulungan	Tanjung Selor	Apung
	Malinau	Malinau Selatan	Long Loreh
	Nunukan	Nunukan Selatan	Nunukan Tengah
	Nunukan	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk
	Nunukan	Sei Menggaris	Sekaduyan Taka
	Tana Tidung	Sesayap Hilir	Sepala Dalung
	Tana Tidung	Tana Lia	Tana Lia
	Tana Tidung	Tana Tidung	Seludau
	Tarakan	Tarakan Timur	Gunung Amal (Kampung 6)

Cakupan penyediaan air bersih

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah KK yang mendapat air bersih dari air bawah tanah}}{\text{Jumlah total KK yang berpotensi memiliki air bersih bawah tanah}} \times 100\% \\
 & = \frac{34}{447} \times 100\% = 7,60\%
 \end{aligned}$$

Adapun program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator cakupan penyediaan air bersih adalah program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah.

Tercapainya indikator kinerja juga tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Geologi dan air tanah selama tahun 2018, antara lain :

- a. Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah di Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan.
- b. Sosialisasi Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah di Kota Tarakan.

- c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah merupakan kegiatan dalam rangka mengawasi dan menghimpun data kegiatan pertambangan batubara maupun mineral, baik pertambangan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi serta mengawasi dan menghimpun data kegiatan pengeboran air tanah oleh masyarakat

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di bidang geologi dan air tanah adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat luasnya wilayah dan keterbatasan dana;
- b. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan izin pengusahaan air tanah dan mekanisme penerbitannya;
- c. Masih banyaknya Pengguna Air Tanah/Sumur Bor untuk usaha yang tidak memasang Flow meter di Sumur Bornya sehingga perlu dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi lanjutan mengenai hal ini;
- d. Potensi hilangnya Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Air Tanah;
- e. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang Geologi;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- g. Kegiatan sosialisasi belum melibatkan aparat pemerintah yang mempunyai tugas di bidang penegakan hukum sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman pelaku usaha dari segi peraturan terkait pengusahaan air tanah serta sanksi atau akibat jika tidak mematuhi.

2.1.2 Pencapaian Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program yang diperuntukkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dengan persentase realisasi fisik sebesar 92,74% dan realisasi keuangan sebesar 85,05% dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan Rp. 3.058.146.096,00 dari anggaran sebesar Rp. 3.595.747.896,70 sehingga ada deviasi sebesar Rp. 537.601.800,70 yang pada umumnya merupakan bentuk penghematan yang mana penggunaan anggaran yang ada disesuaikan dengan kebutuhan SKPD. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebagai berikut:

- ✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan realisasi fisik sebesar 20,74% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49,77% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.769.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.13.600.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terlaksananya pelayanan surat menyurat di Dinas ESDM sebanyak 800 lembar surat. Tidak maksimalnya serapan anggaran dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi fisik sebesar 26,47% dan realisasi keuangan sebesar 56,64% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.81.103.929,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 143.200.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik di Dinas ESDM selama 12 bulan. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pada bulan April 2018, Dinas ESDM pindah ke gedung gabungan dinas (gedung gadis) sehingga untuk biaya penyediaan jasa sumber daya air dan listrik sudah termasuk dalam anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Utara.

- ✚ Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 43,50% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 13.050.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan 138 unit peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas ESDM. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 61,31% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 97.487.593,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.159.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan 14 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda 4 yang ada di Dinas ESDM. Masih rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan realisasi fisik sebesar 93,76% dan realisasi keuangan sebesar 79,86% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 982.900.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.230.820.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terpenuhinya pembayaran jasa pengelola keuangan, pengelola kegiatan dan pegawai tidak tetap di Dinas ESDM selama 12 bulan. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran ini dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, selain itu karena besarnya honorarium pengelola keuangan khususnya PPTK berbeda-beda disesuaikan dengan nilai pagu anggaran masing-masing kegiatan yang sudah ditetapkan melalui standarisasi satuan harga belanja pegawai dan belanja barang/jasa TA 2018 sehingga terdapat kelebihan sisa anggaran yang tidak dapat dibayarkan.
- ✚ Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,40% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 47.142.700,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.48.400.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya jasa untuk kebersihan kantor Dinas ESDM selama 12 bulan. Penyerapan ini

sesuai tingkat kebutuhan SKPD dalam 1 tahun operasional.

- ✚ Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,86% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.99.859.100,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.100.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor di Dinas ESDM selama 12 (dua belas) bulan. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan kantor selama 1 tahun.
- ✚ Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi fisik sebesar 93,49% dan realisasi keuangan sebesar 51,31% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 59.005.738,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 115.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan di Dinas ESDM selama 12 (dua belas) bulan. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran ini dikarenakan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,56% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 124.520.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 136.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan oleh Dinas ESDM sebanyak 42 unit. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal karena sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,96% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.992.360 dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh Dinas ESDM sebanyak 5 unit. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan maksimal karena sudah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar

15,63% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.600.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di Dinas ESDM sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) eksemplar. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran ini dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan SKPD.

- ✚ Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi fisik sebesar 70,15% dan realisasi keuangan sebesar 70,07% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 142.227.000 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 202.992.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan tamu yang datang di Dinas ESDM sebanyak 6.000 (enam ribu) porsi. Hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,99% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 517.438.401,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 517.481.200,00. Hasil yang hendak dicapai adalah pegawai Dinas ESDM dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun konsultasi ke luar daerah sebanyak 40 (empat puluh) kali. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan baik dan sesuai dengan kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,99% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 563.604.139,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 563.654.696,70. Hasil yang hendak dicapai adalah pegawai Dinas ESDM dapat menghadiri dan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, pembinaan maupun pengawasan di dalam daerah sebanyak 50 (lima puluh) kali. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan disesuaikan tingkat kebutuhan SKPD.
- ✚ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,40% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 145.120.136,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 146.000.000,00. Hasil

yang hendak dicapai adalah terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar negeri sebanyak 2 kali. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- ✚ Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,64% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 159.426.000,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 160.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 sistem informasi/aplikasi untuk kebutuhan pelaporan di bidang mineral dan batubara Dinas ESDM. Pada prinsipnya sistem informasi/aplikasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program yang diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini berupa penyewaan rumah untuk kantor Dinas ESDM. Realisasi Fisik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 101.200,000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp.101.200.000 atau dengan persentase sebesar 100%. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya rumah yang disewa sebagai kantor Dinas ESDM sebanyak 1 (satu) unit. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena penganggarannya sesuai dengan kebutuhan SKPD.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Pada prinsipnya realisasi fisik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 31.873.091,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 atau dengan persentase sebesar 91.07%. Adapun kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Hasil yang hendak dicapai adalah jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 5 (lima) orang. Penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal karena perencanaannya telah disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemenuhan energi listrik bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sehingga tingkat rasio elektrifikasi Provinsi Kalimantan Utara akan meningkat. Realisasi fisik Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik sebesar 98,69%. Adapun realisasi keuangan Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Ketenagalistrikan adalah sebesar Rp. 6.198.683.659,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.683.729.483,00 atau sebesar 92.74%. Kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dengan realisasi fisik sebesar 94,43% dan realisasi keuangan sebesar 94,08% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 176.346.977,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 187.434.400,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terlaksananya kegiatan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan sebanyak 1 (satu) kegiatan. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- ✚ Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dengan realisasi fisik sebesar 95,07% dan realisasi keuangan sebesar 99,64% dengan penyerapan anggaran

sebesar Rp. 224.839.274,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 225.649.260,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) laporan hasil kegiatan. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

- ✚ Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dengan realisasi fisik sebesar 68,96% dan realisasi keuangan sebesar 69,57% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.173.787,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 148.301.823,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) dokumen RUKD. Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran termasuk rendah diakibatkan karena adanya kegiatan yang tidak dapat terlaksana.
- ✚ Kegiatan Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan dengan realisasi fisik sebesar 91,68% dan realisasi keuangan sebesar 90,45% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.432.053,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 240.400.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 6 (enam) dokumen FS dan DED pengembangan Energi Baru Terbarukan. Pada prinsipnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- ✚ Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,11% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.476.891.568,00 dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.881.944.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terbangunnya 1 (satu) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dengan kapasitas 40 kWp di Dusun Tias, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Anggaran kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara merupakan program yang diadakan dalam rangka menunjang pengawasan kegiatan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga

tercapainya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Realisasi fisik Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik dengan persentase sebesar 99,60% dengan tingkat capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 653.450.967,00 dari pagu anggaran program sebesar Rp. 676.269.999,70 atau 96,63%. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan Umum adalah sebagai berikut:

- ✚ Kegiatan Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 95,79% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 91.195.150,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 95.200.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) buku database pertambangan mineral dan batubara dalam angka.
- ✚ Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 92,56% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 128.574.050,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 138.912.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) laporan hasil pembinaan pengusahaan pertambangan.
- ✚ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara dengan realisasi fisik sebesar 99,02% dan realisasi keuangan sebesar 96,74% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 197.492.649,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 204.157.999,70. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 2 (dua) laporan hasil pembinaan dan pengawasan produksi mineral dan batubara.
- ✚ Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi K.3 Lingkungan Pertambangan dengan realisasi fisik sebesar 99,70% dan realisasi keuangan sebesar 99,24% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 236.189.118,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 238.000.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) laporan hasil pembinaan dan evaluasi K3 lingkungan.

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah merupakan program yang diadakan dalam rangka mengakomodir bidang geologi yang melaksanakan kegiatan koordinasi, sosialisasi kepada para pengguna air tanah dan pelaku pengeboran air tanah serta sebagai sarana untuk melengkapi data geologi di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun realisasi fisik program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebesar 87,67% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.343.250.526,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 382.204.000,00 atau 87,67%. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah adalah sebagai berikut :

- ✚ Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah dengan realisasi fisik sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar 97,60% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 169.881.767,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 174.058.000,00. Hasil yang hendak dicapai adalah terlaksananya 2 (dua) kegiatan sosialisasi di bidang geologi dan air tanah di Provinsi Kalimantan Utara.
- ✚ Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah dengan realisasi fisik sebesar 77,36% dan realisasi keuangan sebesar 83,29% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 173.368.759,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 208.146.400,00. Hasil yang hendak dicapai adalah tersedianya 1 (satu) laporan monev bidang geologi dan air tanah.

2.2 Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2017 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara dengan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2018 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.14
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 dan 2018

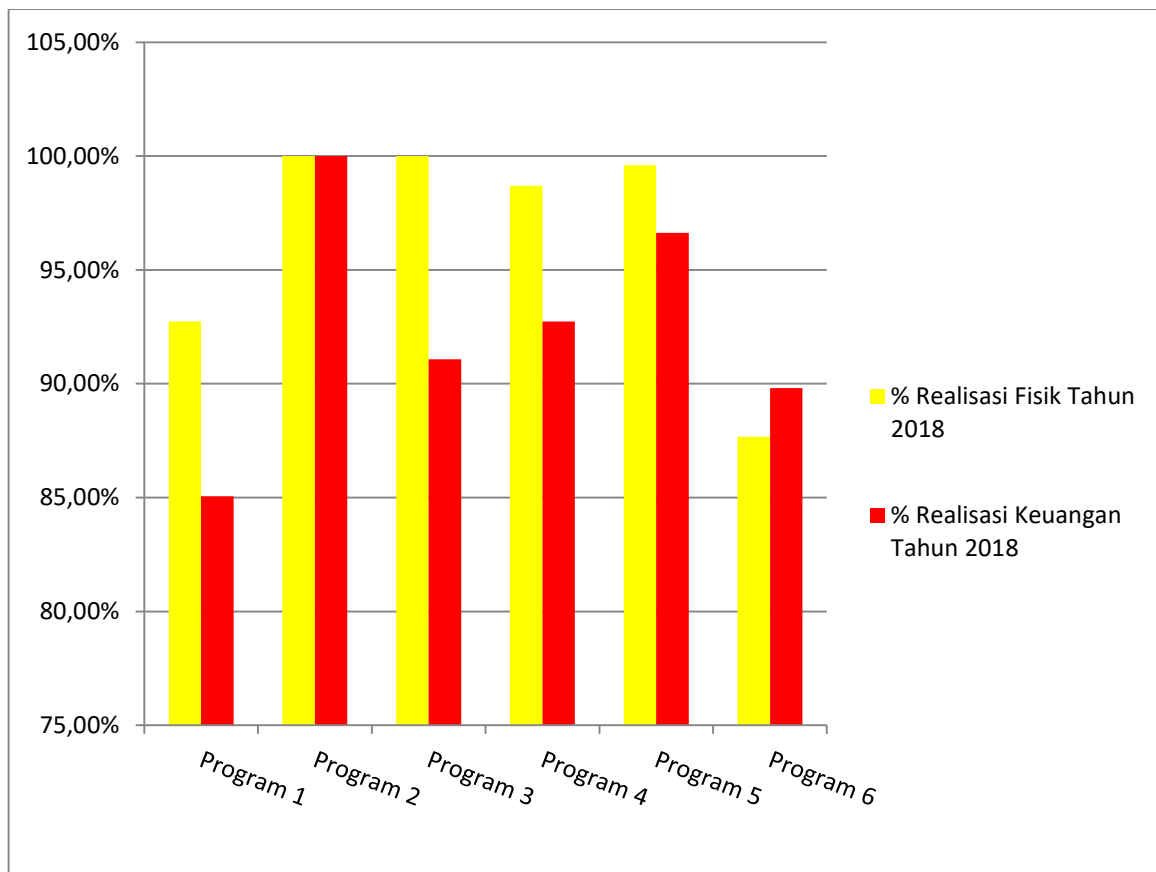
No	Uraian Belanja	Alokasi Anggaran 2017	Realisasi Tahun 2017	Alokasi Anggaran 2018	Realisasi Tahun 2018
1	Belanja Tidak Langsung	4.550.085.307,00	3.900.180.733,00	5.781.951.728,00	4.711.443.233,00
2	Belanja Langsung	9.880.457.000,00	8.258.891.735,00	11.474.151.779,40	10.386.604.339,00
Jumlah		14.430.542.307,00	12.159.072.468,00	17.256.103.507,40	15.098.047.572,00

Pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 17.256.103.507,40. Dibandingkan tahun sebelumnya (2017) angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,58%. Pagu anggaran Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.781.951.728,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.711.443.233,00 atau 81,49%. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.474.151.779,40 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.386.604.339,00 atau 90,52%. Jadi secara umum realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Rp. 15.098.047.572,00 atau 87,49% dengan pagu anggaran Rp. 17.256.103.507,40 dengan deviasi sebesar Rp. 2.158.055.935,40.

Adapun alokasi dan realisasi fisik dan keuangan dana APBD pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel 2.15 di bawah ini :

Tabel 2.15 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Dinas ESDM Prov. Kaltara Per 31 Desember 2018

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN									
PROVINSI KALIMANTAN UTARA									
TAHUN ANGGARAN	: 2018								
LAPORAN BULANAN	: S.D DESEMBER								
UNIT ORGANISASI	: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
SUB UNIT ORGANISASI	: DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	REALISASI					SISA ANGGARAN (Rp.)
				FISIK		KEUANGAN			
				%	TTB (%)	Rp.	%	TTB (%)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,781,951,728	33.51	100.00	33.51	4,711,443,233	81.49	27.30	1,070,508,495
5.1.1	Belanja Pegawai	5,781,951,728	33.51	100.00	33.51	4,711,443,233	81.49	27.30	1,070,508,495
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2,814,351,728	16.31	100.00	16.31	2,159,164,219	76.72	12.51	655,187,509
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2,967,600,000	17.20	100.00	17.20	2,552,279,014	86.00	14.79	415,320,986
	BELANJA LANGSUNG	11,474,151,779	66.49	96.53	64.18	10,386,604,339	90.52	60.19	1,087,547,440
3.05. .3.05.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,595,747,897	20.84	92.74	19.33	3,058,146,096	85.05	17.72	537,601,801
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,600,000	0.08	20.74	0.02	6,769,000	49.77	0.04	6,831,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143,200,000	0.83	26.47	0.22	81,103,929	56.64	0.47	62,096,071
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30,000,000	0.17	100.00	0.17	13,050,000	43.50	0.08	16,950,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	159,000,000	0.92	100.00	0.92	97,487,593	61.31	0.56	61,512,407
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,230,820,000	7.13	93.76	6.69	982,900,000	79.86	5.70	247,920,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48,400,000	0.28	100.00	0.28	47,142,700	97.40	0.27	1,257,300
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,000,000	0.58	100.00	0.58	99,859,100	99.86	0.58	140,900
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	115,000,000	0.67	93.49	0.62	59,005,738	51.31	0.34	55,994,262
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136,000,000	0.79	100.00	0.79	124,520,000	91.56	0.72	11,480,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	0.12	100.00	0.12	16,992,360	84.96	0.10	3,007,640
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000	0.06	100.00	0.06	1,500,000	15.63	0.01	8,100,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	202,992,000	1.18	70.15	0.83	142,227,000	70.07	0.82	60,765,000
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	517,481,200	3.00	100.00	3.00	517,438,401	99.99	3.00	42,799
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	563,654,697	3.27	100.00	3.27	563,604,139	99.99	3.27	50,558
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 21	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	146,000,000	0.85	100.00	0.85	145,120,136	99.40	0.84	879,864
3.05. .3.05.01.01 . 01 . 22	Penyediaan dan pemeliharaan sistem informasi*	160,000,000	0.93	100.00	0.93	159,426,000	99.64	0.92	574,000
3.05. .3.05.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	101,200,000	0.59	100.00	0.59	101,200,000	100.00	0.59	0
3.05. .3.05.01.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Motor Dinas	101,200,000	0.59	100.00	0.59	101,200,000	100.00	0.59	0
3.05. .3.05.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35,000,000	0.20	100.00	0.20	31,873,091	91.07	0.18	3,126,909
3.05. .3.05.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	35,000,000	0.20	100.00	0.20	31,873,091	91.07	0.18	3,126,909
3.05. .3.05.01.01 . 16	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6,683,729,483	38.73	98.69	38.22	6,198,683,659	92.74	35.92	485,045,824
3.05. .3.05.01.01 . 16 . 01	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi Baru Terbarukan	187,434,400	1.09	94.43	1.03	176,346,977	94.08	1.02	11,087,423
3.05. .3.05.01.01 . 16 . 02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terk	225,649,260	1.31	95.07	1.24	224,839,274	99.64	1.30	809,986
3.05. .3.05.01.01 . 16 . 07	Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah	148,301,823	0.86	68.96	0.59	103,173,787	69.57	0.60	45,128,036
3.05. .3.05.01.01 . 16 . 19	Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan	240,400,000	1.39	91.68	1.28	217,432,053	90.45	1.26	22,967,947
3.05. .3.05.01.01 . 16 . 37	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan EBT	5,881,944,000	34.09	100.00	34.09	5,476,891,568	93.11	31.74	405,052,432
3.05. .3.05.01.01 . 22	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	676,270,000	3.92	99.60	3.90	653,450,967	96.63	3.79	22,819,033
3.05. .3.05.01.01 . 22 . 01	Penyusunan Database Pertambangan Mineral dan Batubara	95,200,000	0.55	100.00	0.55	91,195,150	95.79	0.53	4,004,850
3.05. .3.05.01.01 . 22 . 02	Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	138,912,000	0.81	100.00	0.81	128,574,050	92.56	0.75	10,337,950
3.05. .3.05.01.01 . 22 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Mineral dan Batubara	204,158,000	1.18	99.02	1.17	197,492,649	96.74	1.14	6,665,351
3.05. .3.05.01.01 . 22 . 17	Pembinaan dan Evaluasi K.3 Lingkungan Pertambangan	238,000,000	1.38	99.70	1.38	236,189,118	99.24	1.37	1,810,882
3.05. .3.05.01.01 . xx	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan air tanah	382,204,400	2.21	87.67	1.94	343,250,526	89.81	1.99	38,953,874
3.05. .3.05.01.01 . xx . 01	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Geologi dan Air Tanah	174,058,000	1.01	100.00	1.01	169,881,767	97.60	0.98	4,176,233
3.05. .3.05.01.01 . xx . xx	Monitoring dan Evaluasi Bidang Geologi dan Air Tanah	208,146,400	1.21	77.36	0.93	173,368,759	83.29	1.00	34,777,641
JUMLAH REALISASI S.D DESEMBER		17,256,103,507	100.00	97.69	97.69	15,098,047,572	87.49	87.49	2,158,055,935



Grafik 2.5 Perbandingan persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Program Dinas ESDM Tahun 2018

Keterangan :

- Program 1 : Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program 2 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program 3 : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program 4 : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
- Program 5 : Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan umum
- Program 6 : Program pembinaan dan pengembangan bidang geologi dan air tanah

BAB III

P E N U T U P

3.1 Kesimpulan

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini menyajikan capaian kinerja maupun pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2018.
2. Pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 17.256.103.507,40. Dibandingkan tahun sebelumnya (2017) angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,58%. Pagu anggaran Tahun 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.781.951.728,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.711.443.233,00 atau 81,49%. Sementara itu, anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.474.151.779,40 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.098.047.572,00 atau 90,52%. Jadi secara umum realisasi Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 adalah Rp. 15.098.047.572,00 atau 87,49% dengan pagu anggaran Rp. 17.256.103.507,40 dengan deviasi sebesar Rp. 2.158.055.935,40..

3.2 Saran

- 1 Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan perencanaan yang sudah dibangun sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome), berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
- 2 Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

- 3 Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga (Pembinaan dan pengawasan pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara) akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan mengevaluasinya.

Demikian penyusunan LKPj Tahun 2018 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Tanjung Selor, 07 Februari 2019

KEPALA DINAS,

Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197302011998031005



LAMPIRAN

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
Program : Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Produk Mineral dan Batubara
Kode Rekening : 3.05.3.05.01.01.15.10

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1 1,1	Belanja : Sewa Ruang Rapat /Pertemuan Kode Rekening : 5.2.2.07.03 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB SDA Minerba TW. I-2018 Tanggal : 16 April 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/20/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/IV/2018		Persiapan Pembukaan sebelum acara dimulai dan pada saat Pelaksanaan kegiatan Penginputan data dilaksanakan
1 1,2	Belanja : Makan dan Minum Rapat Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB SDA Minerba TW. I-2018 Tanggal : 16 April 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/21/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/IV/2018		prasmanan yang disajikan beraneka ragam yaitu, sup udang goreng, ayam kecap, daging asam manis, capcay sajian untuk snack antara lain kue lempeng, kue puding coklat dan kue lumpia daging ayam
2 2,1	Belanja : Sewa Ruang Rapat /Pertemuan Kode Rekening : 5.2.2.07.03 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. II-2018 Tanggal : 12 Juli 2018 Hotel : Galaxy Tarakan Nota Pembelian : 027/44/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/IV/2018		kata sambutan oleh Kepala Seksi konservasi dan pemanfaatan Minerba pada saat acara berlangsung dan sesi foto bersama Kadis ESDM Provinsi Kaltara

2 2,2	Belanja : Makan dan Minum Rapat Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. II-2018 Tanggal : 12 Juli 2018 Hotel : Galaxy Tarakan Nota Pembelian : 027/45/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/IV/2018	 	Prasmana yang disajikan di antaranya sup Asparagus, capcay, udang asam manis, ikan goreng dan daging sapi lada hitam dan mie goreng. untuk sajian snack yaitu kue lempeng, kue brownis keju dan kue bolu
3 3,1	Belanja : Sewa Ruang Rapat /Pertemuan Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. III-2018 Tanggal : 20 Oktober 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/66/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/X/2018	 	setelah acara pembukaan dilanjutkan oleh pembacaan doa dan kata sambutan dari KESDM RI yang disampaikan oleh Ibu Anastasia
3 3,2	Belanja : Makan dan Minum Rapat Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. III-2018 Tanggal : 20 Oktober 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/65/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/X/2018	 	Prasmana yang di sajikan yaitu diantaranya Udang Asam manis dan snack yang disajikan yaitu lempeng dan kue sus

4 4,1	Belanja : Sewa Ruang Rapat /Pertemuan Kode Rekening : 5.2.2.07.03 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. IV-2018 Tanggal : 29 Nopember 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/88/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/XI/2018	 	pada saat penginputan data Bukti setor sedang berlangsung, dan kegiatan pembacaan doa akan segera dimulai
4 4,2	Belanja : Makan dan Minum Rapat Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Pra Rekonsiliasi PNPB dan Produksi Penjualan SDA Minerba TW. IV-2018 Tanggal : 29 Nopember 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/88/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/XI/2018	 	Prasmana yang disajikan antara lain, Sup ayam, sambal goreng tahu, ikan goreng, kacang panjang sosis tumis, udang asam manis untuk snack diantaranya lumpia daging ayam, kue lempeng dan kue bingkis keju
5 5,1	Belanja : Sewa Ruang Rapat /Pertemuan Kode Rekening : 5.2.2.07.03 Kegiatan : Rembug Bersama Strategi Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Tanggal : 14 Maret 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/07/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/III/2018	 	pada saat acara akan berakhir memasuki sesi foto bersama antara perusahaan dari DESDM Minerba prov. Kaltara dan KESDM Minerba Jakarta. dan acara pada saat sesi tanya jawab tentang Strategi Penyusunan Cetak Biru (Blue Print)

5 5,2	Belanja : Makan dan Minum Rapat Kode Rekening : 5.2.2.11.02 Kegiatan : Rembug Bersama Strategi Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) PPM Tanggal : 14 Maret 2018 Hotel : DC. Mega Tanjung Selor Nota Pembelian : 027/08/Nota/Pra Rekon-Minerba/DESDM-II/III/2018	 	Prasmanan yang disajikan diantaranya sup ayam, udang goreng, buncis kembang kol sosis tumis, daging sapi lada hitam, ayam masak mentega untuk snack yang disajikan kue lumpia, kue martabak coklat keju mini.
6	Kegiatan : Rekonsiliasi PNBP SDA Minerba TW. I-2018 Tanggal : 18 s.d 19 April 2018 Alamat : Hotel IPB ICC (Botani Square) Bogor Jawa Barat No. SPT : 094/94.1/SPT/DESDM/IV/2018	 	Pada saat kegiatan berlangsung acara pemaparan bahan rekonsiliasi dan kegiatan penginputan data bukti setor PNBP
7	Kegiatan : Rekonsiliasi PNBP SDA Minerba TW. II-2018 Tanggal : 25 s. d 26 Juli 2018 Alamat : Hotel Harris Conventions Bekasi Jawa Barat No. SPT : 094/188/SPT/DESDM/VII/2018	 	saat cara belum dimulai dan pada saat penginputan data bukti setor PNBP

8	<p>Kegiatan : Rekonsiliasi PNBP SDA Minerba TW. III-2018</p> <p>Tanggal : 25 s.d 26 Oktober 2018</p> <p>Alamat : Hotel Horison Bekasi Jawa Barat</p> <p>No. SPT : 094/293/SPT/DESDM/X/2018</p>	 	<p>Pemaparan rencana dan target PNBP tahun 2018 dan sesi foto bersama khusus Provinsi Kalimantan Utara bersama KESDM Jakarta</p>
9	<p>Kegiatan : Rekonsiliasi PNBP SDA Minerba TW. IV-2018</p> <p>Tanggal : 5 s.d 6 Desember 2018</p> <p>Alamat : Hotel Eastparc Yogyakarta</p> <p>No. SPT : 094/323/SPT/DESDM/XII/2018</p>	 	<p>mendengarkan pemaparan hasil untuk Dana Bagi Hasil PNBP 2018 dan Pemaparan SUPEL</p>





Tanjung Selor 26 Desember 2018






PPTK

R. Adi Hernadi, IS, ST
NIP. 19730107 200112 1 003







TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Instansi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
Program : Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Produk Mineral dan Batubara
Kode Rekening : 3.05.3.05.01.01.15.10

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
10	No.SPT : 094/56.1/SPT/DESDM/IIIV/2018 Pelaksana : H. Nur Ansar, SE., MM Tujuan : Semarang Waktu : 4 Hari Tanggal : 15 - 18 Maret 2018 Kegiatan : Menghadiri Undangan Rekonsiliasi Data Rencana dan Kapasitas Produksi Batubara Perusahaan Tahun 2018-2024 Yang Sudah Disetujui Fasibility Study nya Tiap Provinsi	 	Pembukaan dan Paparan Kementerian ESDM tentang rencana produksi Batubara 2019 Penginputan Data Rencana dan Kapasitas Batubara Tahun 2018 - 2024
11	No.SPT : 094/56/SPT/DESDM/III/2018 Pelaksana : R. Adi Hernaldi IS, ST dan Zainal Arifin, ST Tujuan : PT. Perkasa Energi dan PT. MJE Waktu : 3 Hari Tanggal : 19 - 21 Maret 2018 Kegiatan : Pengawasan produksi kegiatan pertambangan Minerba pada Perusahaan PT. Perkasa Energi dan PT. MJE Kec. Tg Palas Utara	 	Peninjauan lokasi stock file PT. PE dan pada saat meninjau area penambangan (PIT) PT. MJE
12	No.SPT : 094/90/SPT/DESDM/IV/2018 Pelaksana : H. Nur Ansar, SE., MM Tujuan : Bandung Waktu : 3 Hari Tanggal : 10 -13 April 2018 Kegiatan : Menghadiri Undangan Penyusunan Rencana Penetapan Dana Bagi Hasil Daerah Penghasil PNBPN Mineral dan Batubara di Kota Bandung	 	Mendengarkan pemaparan mengenai output perencanaan DBH SDA Minerba diarahkan pada kebijakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat
13	No.SPT : 094/102.1/SPT/DESDM/V/2018 Pelaksana : Zainal Arifin, ST Tujuan : Bandung Waktu : 4 Hari Tanggal : 1 - 4 Mei 2018 Kegiatan : Undangan Rekonsiliasi Data Produksi dan Penjualan Batubara Nasional	 	Pengambilan dokumentasi sebelum acara dimulai dan mendengarkan penjelasan mengenai Target dan realisasi produksi dan Penjualan Batubara.

14	<p>No.SPT : 094/103/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Rini Lestari, A.Md dan Jayadi, ST</p> <p>Tujuan : PT. SPP dan PT. DTR</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 2 -5 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Triwulan I s.d Triwulan II TA. 2018 di Nunukan</p>	 	<p>- mendengarkan penjelasan mengenai proses crushing untuk menentukan sizing yang siap diangkut</p> <p>- persiapan pembuatan Berita acara hasil pengawasan produksi PT. DTR</p>
15	<p>No.SPT : 094/104/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Rini Lestari, A.Md dan Ridwan, ST</p> <p>Tujuan : PT. LIM dan PT. Tubindo</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 8 -11 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Triwulan I s.d Triwulan II TA. 2018 di Bulungan</p>	 	<p>- mendengarkan penjelasan KTT PT. Tubindo tentang alat muat di area Penambangan (PIT)</p> <p>- saat meninjau Lokasi stockfile dan progres pembangunan conveyor pada PT. LIM</p>
16	<p>No.SPT : 094/118/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Zainal Arifin, ST, Perri, ST, Jayadi, ST</p> <p>Tujuan : PT. KPUC dan PT. MA</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 14 -17 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan produksi kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara Pada Perusahaan PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk dan PT. Kayan Putra Utama Coal Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau</p>	 	<p>- pada saat menerima penjelasan induksi sesampainya di mine office PT. KPUC</p> <p>- pada saat peninjauan area kantor jembatan timbang PT. Ma</p>
17	<p>No.SPT : 094/128/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Rini Lestari, A.Md dan Hilda Rahmawati, A.Md, Kendra Valentin, ST.</p> <p>Tujuan : PT. AAJ dan PT. PMR</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 22 - 25 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ke PT. Pipit Mutiara Raya dan PT. Anjas Anita Jaya Kab. Nunukan</p>	 	<p>- pada saat peninjauan area penambangan (PIT) PT AAJ</p> <p>- berfoto bersama KTT PT. PMR sebelum pemeriksaan kelengkapan Dokumen Produksi dan Penjualan dilanjutkan</p>

18	<p>No.SPT : 094/127/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Andaso, ST, Ridwan, ST, Fathan Aprilley,SE</p> <p>Tujuan : PT. Pipit Mutiara Jaya</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 23-25 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ke PT. Pipit Mutiara Jaya Kab. Tana Tidung</p>	 	<p>- Melakukan pengecekan data produksi dan kelengkapan administrasi penjualan Batubara</p> <p>- Melakukan peninjauan ke areal stockpile pada PT. PMJ</p>
19	<p>No.SPT : 094/174/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : R. Adi Hernaldi IS, ST, Abdul Hadi ST, Henni Nubaiti,ST, Iwan K,S.Sos, R. Idris M,SE, Noviansyah</p> <p>Tujuan : Tarakan</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 11- 13 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Pra Rekonsiliasi PNBPD Minerba Tw. II Tahun 2018 dan Sosialisasi Pemenuhan DMO Batubara Tahun 2018</p>	 	<p>- pada saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum acara penginputan data bukti setor dilaksanakan</p> <p>- pemaparan mengenai sosialisasi Pemenuhan DMO Batubara Tahun 2018</p>
20	<p>No.SPT : 094/175/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Eko Budi Santoso, ST, Roni Tamara Saputra, S.IP, Aditya Perdana S. Kom, Monalisa Padda, SE, Hilda Rahmawati, A.Md, Iwan Kristian P, S.Sos.</p> <p>Tujuan : Tarakan</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 11- 13 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Pra Rekonsiliasi PNBPD Minerba Tw. II Tahun 2018 dan Sosialisasi Pemenuhan DMO Batubara Tahun 2018</p>	 	<p>- Proses penandatanganan hasil kesepakatan terkait DMO untuk ditembuskan ke Dirjen Minerba</p> <p>- kegiatan tanya jawab mengenai DMO yang akan ditembuskan ke Dirjen Minerba</p>
21	<p>No.SPT : 094/176/SPT/DESDM/V/2018</p> <p>Pelaksana : Zainal Arifin, ST, Ridwan, ST, Rini Lestari, A.Md, Novita Sugiharti Priliana, SE, Jayadi, ST.</p> <p>Tujuan : Tarakan</p> <p>Waktu : 4 Hari</p> <p>Tanggal : 11- 13 Mei 2018</p> <p>Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Pra Rekonsiliasi PNBPD Minerba Tw. II Tahun 2018 dan Sosialisasi Pemenuhan DMO Batubara Tahun 2018</p>	 	<p>- Proses penginputan data PNBPD dari Pihak Perusahaan Tambang</p> <p>- dan proses penandatanganan Berita Acara Pra Rekonsiliasi Produksi dan Penjualan Batubara</p>

22	<p>No.SPT : 094/196/SPT/DESDM/VIII/2018</p> <p>Pelaksana : R. Adi Hernaldi IS, ST, Zainal Arifin, ST, Eko Budi Santoso, ST.</p> <p>Tujuan : Tarakan</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 30 Juli - 1 Agust 2018</p> <p>Kegiatan : Menghadiri Undangan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Cetak Biru PPM di Tarakan</p>	 	<p>pada saat mendengarkan pemaparan Tim Penyusun Forum FGD dan</p> <p>kegiatan pada saat acara akan selesai dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama Kepala dinas ESDM Provinsi Kaltara.</p>
23	<p>No.SPT : 094/202/SPT/DESDM/VIII/2018</p> <p>Pelaksana : R. Adi Hernaldi IS, ST, Zainal Arifin, ST, Henni Nurbaiti, ST</p> <p>Tujuan : Tarakan</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 5-7 Agustus 2018</p> <p>Kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan</p>	 	<p>kegiatan pada saat mendengarkan pemaparan oleh narasumber dari anggota komisi VII DPR Dapil Provinsi Kalimantan Utara, Direktur Pembinaan pengusahaan Batubara, Kepala seksi Perlindungan Lingkungan Minerba Ditjen minerba dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara dan sebagai Moderator Bpk. Zainal Arifin</p>
24	<p>No.SPT : 094/234/SPT/DESDM/IX/2018</p> <p>Pelaksana : Zainal Arifin, ST, Jayadi, ST.</p> <p>Tujuan : PT. PE dan PT. Tubindo</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 5-7 September 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Perusahaan PT. Perkasa Energi Kec. Sekatak dan PT. Tubindo Kec. Tg. Palas Tengah Di Bulungan</p>	 	<p>- pada saat meninjau lokasi stock file PT. Perkasa Energi</p> <p>- persiapan menuju area penambangan batubara (Pit) PT. TUBINDO</p>
25	<p>No.SPT : 094/277.1/SPT/DESDM/X/2018</p> <p>Pelaksana : Parasian Siagian, ST, Rini Lestari, A.Md.</p> <p>Tujuan : PT. SPP dan PT. DTR</p> <p>Waktu : 3 Hari</p> <p>Tanggal : 15-17 Oktober 2018</p> <p>Kegiatan : Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Perusahaan PT. Perkasa Energi Kec. Sekatak dan PT. Tubindo Kec. Tg. Palas Tengah Di Bulungan</p>	 	<p>- Melakukan Peninjauan stockfile batubara PT. DTR</p> <p>- membuat berita acara Pengawasan produksi emas PT. SPP</p>

26	No.SPT : 094/296.1/SPT/DESDM/X/2018 Pelaksana : Indri Wahyuni, ST, Wisnu, ST. Tujuan : PT. KPUC dan PT. AMNK Waktu : 3 Hari Tanggal : 29-31 Oktober 2018 Kegiatan : Pengawasan Produksi Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Perusahaan PT.Kayan Putra Utama Coal dan PT. Atha Marth Naha Kromo di Kab. Malinau	 	- Pengawasan dilakukan pada PIT I PT. AMNK - memantau keadaan di area stock file PT. KPUC
27	No.SPT : 094/316/SPT/DESDM/XI/2018 Pelaksana : R. Adi Hernadi Ismailsyah ST, dan Zainal Arifin, ST. Tujuan : Tarakan Waktu : 4 Hari Tanggal : 25-27 November 2018 Kegiatan : Mengikuti Kegiatan FGD Sosialisasi Rancangan Dokumen Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi Kalimantan Utara	 	Pada saat pembukaan acara FGD Cetak Biru PPM dan pada saat coffe break

Tanjung Selor 26 Desember 2018





PPTK




R. Adi Hernadi, IS, ST
 NIP. 19730107 200112 1 003





TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kegiatan : Penyusunan Database Pertambangan
Kode Rekening : 3.05.3.05.01.15.12

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
1.	Kegiatan Survei Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Nunukan. Tanggal Pelaksanaan 12 – 14 September 2018		Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Nunukan dan pelaksana kegiatan adalah : 1. Wisnu, ST 2. Henni Nurbaiti, ST
2.	Kegiatan Survei Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Malinau Tanggal Pelaksanaan 17 – 19 September 2018		Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Malinau dan pelaksana kegiatan adalah : 1. Abdul Hadi, ST 2. Iwan Kristian Palino, S.Sos




3.	<p>Kegiatan Survei Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Tana Tidung.</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 19 – 21 September 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rini Lestari, A.Md 2. Parasian, ST
4.	<p>Kegiatan Survei Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tarakan.</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 19 – 21 September 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kota Tarakan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indri Wahyuni, ST 2. Raden Idris Mawardi
5.	<p>Kegiatan Survei Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bulungan.</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 27 – 29 September 2018</p>	 	<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Bulungan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Hadi, ST 2. Indri Wahyuni, ST 3. Iwan Kristian Palino, S.Sos 4. Raden Idris Mawardi

			
6.	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT. Atha Marth Naha Kramo di Kabupaten Malinau.</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 4 – 6 Oktober 2018</p>	 	<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Malinau dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ridwan, ST 2. Jayadi 3. Novita
7.	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT. Lamindo Inter Mutikon dan PT. Garda Tujuh Buana, Tbk di Kabupaten Bulungan</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 10 – 13 Oktober 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Bulungan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parasian, ST

		  	<ol style="list-style-type: none"> 2. Monalisa .P , SE 3. Raden Idris Mawardi
8.	Melaksanakana Tinjauan Lokasi Permohonan WIUP di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Tanggal Pelaksanaan 13 – 15 Oktober 2018		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Malinau dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Hadi, ST 2. Iban Edi .S, SE

			
9.	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT.Kayan Putra Utama Coal di Kabupaten Malinau</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 17 – 19 Oktober 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Malinau dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indri Wahyuni, ST 2. Iban Edi .S, SE
10.	<p>Mengikuti Rapat Koordinasi Tata Ruang se- Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 24 – 26 Oktober 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kota Tarakan di Hotel Monaco dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Hadi, ST

			
11.	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT.Pipit Mutiara Jaya dan PT. Pipit Mutiara Raya di kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 24 – 27 Oktober 2018</p>	 	<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisnu, ST 2. Zulfikar Pratama, S.STP 3. Iwan Kristian Palino, S.Sos

		 	
12	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT. Duta Tambang Rekayasa di Kabupaten Nunukan</p> <p>Tanggal Pelaksanaan 31 Oktober – 02 November 2018</p>		<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ridwan ST 2. Henni Nurbaiti, ST

			
13	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan PROPER Pertambangan Mineral dan Batubara Tahap I Periode 2018-2019 ke PT. Mandiri Inti Perkasa dan PT. Sarana Mandiri Utama di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Tanggal Pelaksanaan 07 – 10 November 2018</p>	 	<p>Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan dan pelaksana kegiatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Eko Budi Santoso ST 4. Rini Lestari, A.Md 5. Juelti, SE



B	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
1.	Koordinasi Ke Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Ri Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara		Kegiatan di Laksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan dan pelaksana kegiatan adalah : 1. Eko Budi Santoso ST

Tanjung Selor, 21 Desember 2018

PPTK,

Eko Budi Santoso, ST
Penata Muda TK. I / (III.b)
NIP. 19820124 201101 1 004

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kegiatan : Pembinaan Dan Evaluasi K3 Lingkungan Pertambangan
Kode Rekening : 3.05.3.05.01.15.17

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
A	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
1.	Kegiatan pemeriksaan / investigasi kecelakaan kerja (fatality) di PT. Lamindo Inter Multikon (05 Desember – 07 Desember 2018)	   	

2. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di PT. Anjas Anita Jaya dan PT. Pipit Mutiara Raya (18 September – 21 September 2018).



3. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di PT. Atha Marth Naha kramo serta pemeriksaan kondisi fisik tangki penimbunan bahan bakar cair (BBC) di PT. Baradinamika Mudasukses(15 September – 17 September 2018).



4. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin serta pemeriksaan kondisi fisik (peninjauan lokasi) tangki penimbunan bahan bakar cair (BBC) di PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk (12 September – 14 September 2018).



5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di Lokasi IUP PT Lamindo Inter Multikon (5 September - 7 September 2018).



6. Kegiatan pemeriksaan kecelakaan kerja (investigasi) fatality di PT. Atha Marth Naha Kramo (03 Agustus – 05 Agustus 2018)



7. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di PT. Mitrabara Adiperdana (30 Juli – 1 Agustus 2018).



8. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin di PT. AMNK (26 Juli – 28 Juli 2018).



9. Peninjauan Pembangunan Tangki Bahan Cair PT. AMNK dan PT. KPUC (14 Agustus - 17 Agustus 2018).



10. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan (6 Agustus – 8 Agustus 2018)



11. Peninjauan Lapangan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Untuk Pencairan Jaminan Reklamasi PT. Sago Prima Pratama (7 Maret – 10 Maret 2018).



12. Peninjauan Lapangan PT. Mandiri Inti Perkasa (30 April – 3 Mei 2018)



13. Kegiatan pembinaan dan pengawasan aspek Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan ke PT. Perkasa Energy (25 April 2018 - April 2018).



14. Kegiatan pembinaan dan pengawasan rutin
Pertambangan batubara di PT.AMNK
Kab.Malinau (27 Maret – 29 Maret 2018).



15. peninjauan lapangan perpanjangan izin tangki penimbunan bahan bakar cair dan pemasangan tanda batas PT. Pipit Mutiara Jaya (27 Maret – 29 Maret 2018)



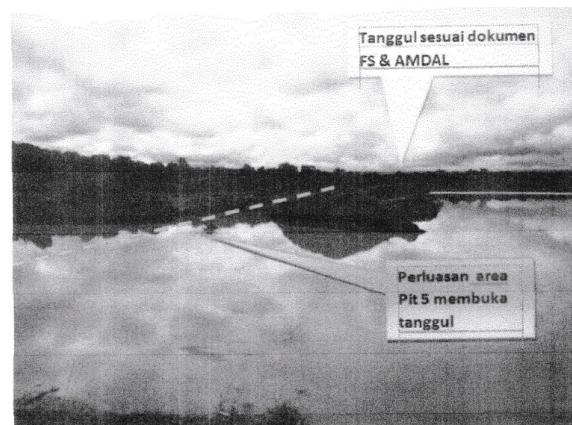
16. Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Pertambangan di Tarakan (23 Februari –25 Februari 2018).



17. Membantu Kepala Dinas ESDM dalam pendampingan kunjungan anggota Komisi VII DPR RI (20 Februari 2018 - 22 Februari 2018).




18. Inspeksi K3 Lingkungan ke lokasi Tambang PT. AMNK Kabupaten Malinau (30 Januari – 1 Februari 2018).



19. Untuk mendapatkan acuan pada implementasi Tata Kelola Reklamasi dan Pasca tambang Serta Pengelolaan Lubang Bekas Tambang di Provinsi Kalimantan Utara.



B	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	
1.	<p>Konsultasi teknis cara perhitungan jaminan rencana reklamasi ke Dinas ESDM Prov. Kaltim</p> <p>2 Juli 2018 s/d 6 Juli 2018</p>	

2. Untuk menghadiri Undangan One Day Meeting Dalam Rangka Sosialisasi Regulasi Mineral dan Batubara Aspek Teknik Lingkungan



3. Untuk mendapatkan acuan pada implementasi Tata Kelola Reklamasi dan Pasca tambang Serta Pengelolaan Lubang Bekas Tambang di Provinsi Kalimantan Utara.



4.



Tanjung Selor, 21 Desember 2018

PPTK,

Eko Budi Santoso, ST
Penata Muda TK. I / (III.b)
NIP. 19820124 201101 1 004



TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN


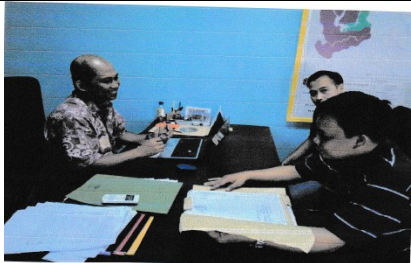





Program : Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Kegiatan : Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
Kode Rekening : 3.05.3.05.01.15.13

NO	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN GAMBAR
A	Belanja Makanan dan Minum		
1.		   	Rapat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan Acara DMO.

2.	  	Rapat Presentasi Rkab 2019 Pt. Pipit Mutiara Raya
3.	   	Rapat Presentasi Rkab 2019 Pt. Sago Prima Pratama

4.		    	Rapat Presentasi Rkab 2019 Pt. Tubindo
5.		    	Rapat Presentasi Rkab 2019 Pt. Pipit Mutiara Jaya

B	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
1.	Pendampingan Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis Peninjauan terhadap Pengusahaan, Penggunaan dan Batas Tanah Dalam Rangka Membantu Melaksanakan Tugas Panitia B atas Permohonan HGU PT. Sebuk Inti Plantation di Kabupaten Nunukan		<p>Dalam hal ini dinas terkait diminta mengenai masalah tumpang tindih lahan dengan perusahaan batubara, perkebunan, kehutanan dinyatakan Clear.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh : Andaso, ST</p>
2.	Koordinasi ke Kantor Bapeda Kabupaten Nunukan mengenai database Mineral dan Batubara		<p>Kegiatan ini adalah berkoordinasi ke Kantor Bapeda Kab. Nunukan langsung bertemu dengan Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kab. Nunukan</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andaso, ST 2. Raden Idris Mawardi

			
3.	Koordinasi ke Kantor Bapeda Kabupaten Nunukan mengenai database Mineral dan Batubara	 	<p>Kegiatan ini adalah berkoordinasi ke Kantor Bapeda Kab. Nunukan langsung bertemu dengan Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kab. Nunukan</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Andaso, ST 4. Raden Idris Mawardi
4.	Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Tambang Batubara Tahap II Periode 2017/2018 ke PT. Pipit Mutiara Jaya Site Bebatu	   	<p>Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendampingi DLH Prov. Kaltara dalam pelaksanaan pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh : Ferry Ruruk Pasiakan, SE, MT</p>

5. Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Pertambangan Batubara Tahap II Periode 2017/2018 di PT. Lamindo Inter Multikon.



Kegiatan proper tahap ke – II tahun 2017/2018 pada perusahaan pertambangan batubara PT. Lamindo Inter Multikon di Kec. Bunyu Kabupaten Bulungan bertujuan untuk melihat pengelolaan lingkungan hidup dan menilai ketaatan pelaku usaha pertambangan batubara dalam menjalankan peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

5. R. Adi Hernadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
6. Zainal Arifin, ST (Kasi Konservasi dan Produksi)

6. Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



Kegiatan Rapat dilaksanakan sehubungan dengan rapat koordinasi pelayanan terpadu satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tema Sinkronisasi Data Perizinan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Materi yang disampaikan pada rakor tersebut adalah :

1. Implementasi Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah
2. Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1. R. Adi Hernadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
2. Kendra Valentine, ST

7. Menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kalimantan Utara dan Penandatanganan Nota Kesepahaman BPKP dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan



Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Tarakan di hadir oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Bupati/Walikota Sekaltara, Kepala BPKP, Wakil Ketua KPK, Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri, Asisten Deputi Aparatur SDM Kementrian MenPAN RB, Sekretaris Utama BPKP, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Ketua Koordinator Unit Korsupgah KPK dan Asisten III Prov. Kaltara.




Kegiatan ini dilaksanakan oleh :

1. Ferry Ruruk Pasiakan, ST

8.	<p>Peninjauan Lapangan Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Dan Pemasangan Tanda Batas PT. Pipit Mutiara Jaya</p>		<p>Peninjauan tanda batas PT. Pipit Mutiara Jaya : tanda batas tersebut sudah dipasang terdiri dari 8 (delapan) buah tanda batas. Peninjauan perpanjangan izin tangki Bahan Bakar Cair terdiri dari 4 (empat) unit tangki yaitu : tangki 01 kapasitas 60.000 liter, tangki 02 kapasitas 50.000 liter, tangki 03 kapasitas 50.000 liter dan tangki 04 kapasitas 50.000 liter</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Andaso, ST 3. Yusnita Rini Gamas, ST 4. Karno, ST 5. Wisnu, ST
9.	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Tambang Batubara Tahap II Periode Tahun 2017/2018 di PT. Mandiri Inti Perkasa</p>		<p>Pada tanggal 12 April telah mengikuti pelaksanaan penilaian tahap II pada kegiatan Proper Tambang Batubara di lokasi PT. Mandiri Intiperkasa penilaian dilakukan untuk memverifikasi temuan pada tahap penilaian pertama.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferry Ruruk Pasiakan, ST 2. Henni Nurbaiti, ST

10.	Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Tambang Batubara Tahap II Periode Tahun 2017/2018 di PT. Mitrabara Adiperdana Kab. Malinau	  	<p>Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka Pelaksanaan PROPER Pertambangan Batubara Tahap II Periode Tahun 2017/2018 di PT. Mitrabara Adiperdana (PT MA) Kab. Malinau yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara bersama-sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltara dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malinau.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Parasian Siagian, ST 4. Iwan Kristian Palino, S.Sos
-----	---	---	--

11.	Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Tambang Batubara Tahap II Periode 2017/2018 ke PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kabupaten Bulungan	 	<p>Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penilaian PROPER Tambang Batubara Tahap II Periode 2017/2018 ke PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara di Kabupaten Bulungan .</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisnu, ST 2. Hilda Rahmawati , A.Md
12.	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan di Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan		<p>Dasar pelaksanaan tugas ini surat a.n Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Kepala Bidang Perencanaan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Nomor 757/364/DPMPTSP/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal permintaan pertimbangan teknis terkait surat permohonan WIUP Batuan a.n H. Jumail. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan peninjauan lapangan dimana Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara</p>

			<p>merupakan instansi Teknis yang memberi pertimbangan teknis.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Andaso, ST 2. Wisnu, ST 3. Henni Nurbaiti, ST
13.	Kegiatan Peninjauan Lokasi Permohonan Izin di Luar WIUP PT. KPUC di Kabupaten Malinau		<p>Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Malinau pada PT. KPUC untuk meninjau permohonan lokasi Izin di luar WIUP.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <p>Ferry Ruruk Pasiakan, SE, MT</p>
14.	Menghadiri Rapat Penentuan Penilaian PROPER Pertambangan, HPH, Perkebunan dan Industri Jasa		<p>Kegiatan Rapat dilaksanakan sehubungan dengan penentuan nilai akhir PROPER terhadap perusahaan pertambangan atas upaya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya masing-masing.</p> <p>Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferry Ruruk Pasiakan, ST 2. Kendra Valentin, ST

	<p>15. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan</p>	 	<p>Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Tarakan dan di selenggarakan oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM.</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eko Budi Santoso, ST 2. Abdul Hadi, ST 3. Hilda Rahmawati, A.Md
--	--	--	--

C	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
1.	Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian KAsus Yang Di Selenggarakan oleh Kelompok Kerja IV (POKJA IV)	 	<p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferry Ruruk, SE,. MT

2. Dalam Rangka Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perizinan Pengusahaan Mineral Dan Batubara Di Kota Balikpapan



Kegiatan ini dilaksanakan oleh :
2. H. Nur Ansar, SE., MM
3. Eko Budi Santoso, ST

3. Melakukan Pendampingan expose perusahaan PT. Damai Bangun Jaya dan PT. Makmur Jaya Prestasi Untuk Mendapatkan Rekomendasi dari BWS Kalimantan III di Samarinda.



Kegiatan ini dilaksanakan oleh :
Perri, ST

4.	<p>Rekonsiliasi Pnbp Sda Minerba Tw. IV TA. 2018 Di Yogyakarta</p>		<p>Kegiatan ini dilaksanakan oleh : Rini Lestari, A.Md</p>
----	--	--	--

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT (DAK)

Kode Rekening : 3.05.3.05.01.17.24

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1	Belanja Infrastruktur Pembangunan PLTS Terpusat 40 kWp		Mobilisasi material
			Pemancangan Kayu Ulin 10 x 10 cm

			<p>Pemasangan Kalang, Gelagar, Suai dan Sloof Kayu Ulin</p>
			<p>Pemasangan Lantai papan ulin</p>



Mobilisasi Material Pagar BRC



Mobilisasi Material SUTR dan Material Instalasi Listrik Rumah dan Fasum

			<p>Pemasangan Rumah Pembangkit</p>
			<p>Pemasangan Instalasi Listrik Rumah dan Fasum</p>

			<p>Pembangunan PLTS Terpusat 40 kWp Dusun Tias, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan telah selesai dan sudah melistriki 231 Rumah Tangga</p>
2	Belanja Jasa Konsultan Pengawas		<p>Laporan akhir belanja jasa konsultan pengawas Pembangunan PLTS Terpusat 40 kWp di Dusun Tias, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan</p>

3	Belanja Jasa Konsultan Perencana		<p>Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) PLTS Terpusat Kelompok Desa Sukamaju, Kecamatan Lumbis Ogong, Kab. Nunukan dan Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung, Kab. Nunukan</p>
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Survey, Pengawasan dan Monitoring)		<p>Survey awal pembangunan PLTS Terpusat di Dusun Tias, Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan pada tanggal 25-27 Januari 2018</p>



Koordinasi dan peninjauan lokasi rencana penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Desain (DED) PLTS Terpusat di Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan pada tanggal 28-30 Maret 2018

		 A photograph showing five people in a meeting. On the left, a man in a light-colored shirt sits in a chair, looking towards the group. In the center, three people (two men and one woman) sit on a brown sofa. On the right, a woman in a light-colored hijab sits on the edge of the sofa, facing the group. A low blue metal coffee table with a glass top is in front of them, holding some papers and a small yellow object. The room has a plain brown wall and a window on the right side.	<p>Koordinasi dan peninjauan lokasi rencana penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) PLTS Terpusat di Kecamatan Peso dan Kabupaten Bulungan pada tanggal 3-6 April 2018</p>
--	--	--	--

			<p>Menghadiri rapat forum diskusi tindak lanjut pengisian aplikasi KRISNA DAK Fisik 2019 di Kota Tarakan pada tanggal 11-12 April 2018</p>
--	--	--	--

			<p>Melakukan koordinasi dan peninjauan lokasi rencana penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) PLTS Terpusat di Dusun Batolaga dan Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan pada tanggal 26-27 April 2018</p>
--	--	--	---



Melakukan koordinasi dan peninjauan lokasi rencana penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) PLTS Terpusat di Kelompok Desa Sukamaju dan Kelompok Desa Ubol, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan pada tanggal 02 – 06 Mei 2018

		 A photograph of a single-story building with a red roof and a sign that reads "BAPPEDA KABUPATEN MALINAU". The building has a covered porch area with wooden pillars. In front of the building is a dirt area with some sparse vegetation and a utility pole.	<p>Melakukan koordinasi dan peninjauan lokasi rencana penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) PLTS Terpusat dan mendata lokasi untuk penyusunan FS dan DED di Kelompok Desa Patal, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan dan BAPPEDA Kabupaten Malinau pada tanggal 02 – 05 Mei 2018</p>
--	--	--	--







Peninjauan lapangan dalam rangka rencana pembangunan PLTS Terpusat di Pulau Sadau, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan pada tanggal 10 – 12 Mei 2018



TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistikan dan Enenrgi Baru Terbarukan

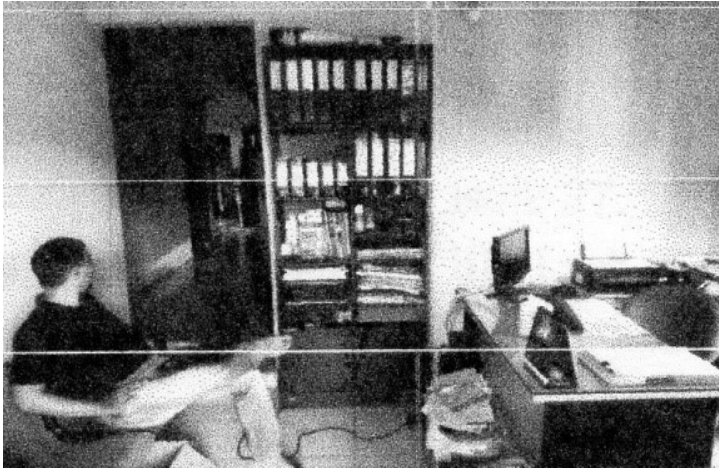

Kode Rekening : 3.05.3.05.01.17.02

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketenagalistikan dan Energi Baru Terbarukan		Koordinasi dan Pengumpulan Data penerima LTSHE
			Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Instalasi Pembangkit (PLTD) dan tempat usaha jasa penunjang listrik PT. Lamindo, Hotel Paradise, Hotel Galaxy, dan PT. Mukti Ambalat Perkasa dalam rangka Proses Izin Operasi (IO) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di Kota Tarakan dan Bunyu

			<p>Melakukan Survey Harga Material PLTS Terpusat</p>
			<p>Pendampingan/Witnes Uji Laik Operasi Ketenagalistrikan (SLO) PT. Intraca Wood Manufactur, PT. Idec Abadi Woodindustries dan PT. Ramayana Lestari Sentosa di Tarakan</p>

			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke PT. Garda Tujuh Buana, PT. Suara Mega Perkasa, Hotel Dynasty dan Mycity Hotel dalam rangka proses Izin Operasi (IO) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kota Tarakan dan Bunyu</p>
			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Instalasi Pembangkit (PLTD) Neo Fortuna Hotel, PT. Tirta Madu Sawit Jaya, PT. Karang Juang Hijau Lestari, PT. Bhumi Simenggaris Indah dalam rangka proses Izin Operasi (IO) di Kabupaten Nunukan</p>



			<p>Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Perihal Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Teknis Pembangunan PLTS terpusat</p>
			<p>Melakukan Pengawasan Lapangan atas Pebaikan dari saran dalam BAP permohonan Izin Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik PT. Tirta Madu Sawit Jaya, PT. Karang Juang Hijau Lestari, PT. Bhumi Simenggaris Indah di Kabupaten Nunukan</p>


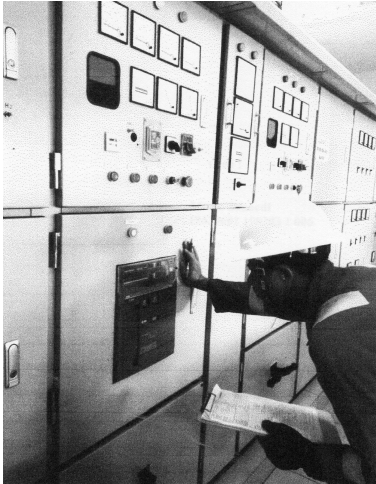
			<p>Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan dan Sertifikasi Ketenagalistrikan dan melakukan pemeriksaan dan peninjauan tempat usaha jasa penunjang tenaga PT. Sinar Kaltara Jaya dalam rangka proses Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di Kota Tarakan</p>
			<p>Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen penawaran paket pekerjaan pembangunan PLTS (Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan dan EBT)</p>

			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke PT. Pipit Mutiara Indah untuk memproses Ijin Operasi (IO) di Desa Sekatak Buji</p>
			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke PT. Suara Mega Perkasa, Padmaloha Hotel, Hotel harmonis Classic, Grand Citra Hotel dan Hotel Dynasty untuk memproses Ijin Operasi (IO) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Tarakan</p>

			<p>Menghadiri Workshop Nasional Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P)</p>
			<p>Menghadiri Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Energi Skala Kecil Triwulan I dan Triwulan II Tahun Anggaran 2018 di Cirebon, Jawa Barat</p>

			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke PT. Kayan Putra Utama Coal dan PT. Artha Marth Naha Krama untuk memproses ijin operasi (IO) di Kabupaten Malinau</p>
			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan ke PT. Bintang Surya Nusa Abadi untuk Memproses Izin Usaha Jaya Panunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di Tarakan</p>

			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke PT. Sumber Baru Ratama, Hotel Lotus, Duta Hotel, Hotel Monaco, Hotel Lembasung dan CV. Smart Jaya Bersama untuk memproses Ijin Operasi (IO) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Tarakan</p>
			<p>Pendampingan/Witnes Uji Laik Operasi Ketenagalistrikan (SLO) PT. Baradinamika Mudasukses di Malinau</p>

			<p>Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan Mesin Pembangkit (PLTD) ke Grand Taufik Hotel untuk mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Tarakan</p>
			<p>Pendampingan/Witnes dalam rangka Sertifikasi Laik Operasi (SLO) mesin pembangkit listrik PT. Sempurna Sejahtera yang dilakukan PT. Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO) di Bambang Sebatik Kab. Nunukan</p>



Melakukan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan ke PT. Federal Internasional Finance untuk memproses Surat Keterangan Terdaftar di Tarakan





Melaksanakan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan ke PT. Permata Nusa Sejati untuk memproses Izin Operasi di Nunukan dan ke Hotel Gajah Mada untuk memproses Surat Keterangan Terdaftar di Tarakan



TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN



Program : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
 Kegiatan : Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan energi baru terbarukan
 Kode Rekening : 3 . 05 . 01 . 01 . 17 . 01

No.	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1.	<p>1 - 3 Februari 2018</p> <p>Telah dilaksanakannya Koordinasi dan konsultasi data pendukung penyusunan Rasio Elektrifikasi pada PT. PLN (Persero) Rayon Nunukan di Nunukan. Koordinasi dan konsultasi dilakukan langsung bersama dengan Manager PT. PLN (Persero) Rayon Nunukan , Fajar Setiadi .</p>		<p>Dokumentasi Koordinasi dan konsultasi data pendukung penyusunan Rasio Elektrifikasi pada PT. PLN (Persero) Rayon Nunukan di Nunukan. Koordinasi dan konsultasi dilakukan langsung bersama dengan Manager PT. PLN (Persero) Rayon Nunukan</p>


2.	<p>4 - 6 Maret 2018</p> <p>Menghadiri dan mendampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan rapat pembahasan suplay BBM dalam mendukung pelayanan 24 jam di Krayan serta percepatan jaringan listrik di Krayan</p>		<p>Dokumentasi Menghadiri dan mendampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan rapat pembahasan suplay BBM dalam mendukung pelayanan 24 jam di Krayan serta percepatan jaringan listrik di Krayan</p>
3.	<p>02 - 04 April 2018</p> <p>Menghadiri kegiatan dari BAPPEDA dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka konservasi dan pembangunan berkelanjutan</p>		<p>Dokumentasi pada saat kegiatan BAPPEDA dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka konservasi dan pembangunan berkelanjutan</p>

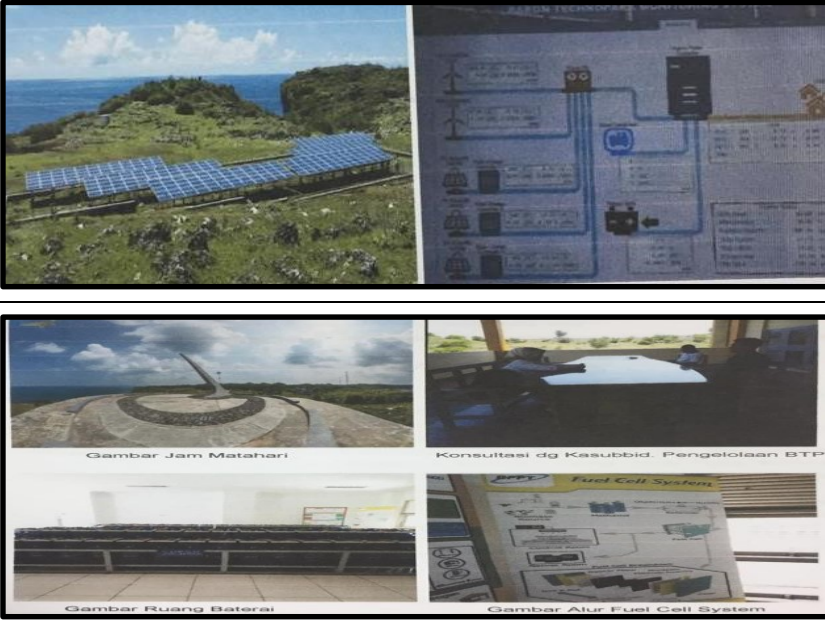

4.	<p>8 - 9 April 2018</p> <p>Menghadiri undangan musrembang RKPD Tahun anggaran 2019 di Kota Tarakan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota tarakan</p>		<p>Dokumentasi musrembang RKPD tahun anggaran 2019 di Kota Tarakan</p>
5.	<p>29 Mei – 1 Juni 2018</p> <p>Konsultasi dan Koordinasi ke PT. PLN (Persero) Kabupaten Tana Tidung untuk penyusunan Rasio Elektrifikasi Tahun 2018 Semester I</p>		<p>Dokumentasi Konsultasi dan Koordinasi ke PT. PLN (Persero) Kabupaten Tana Tidung</p>

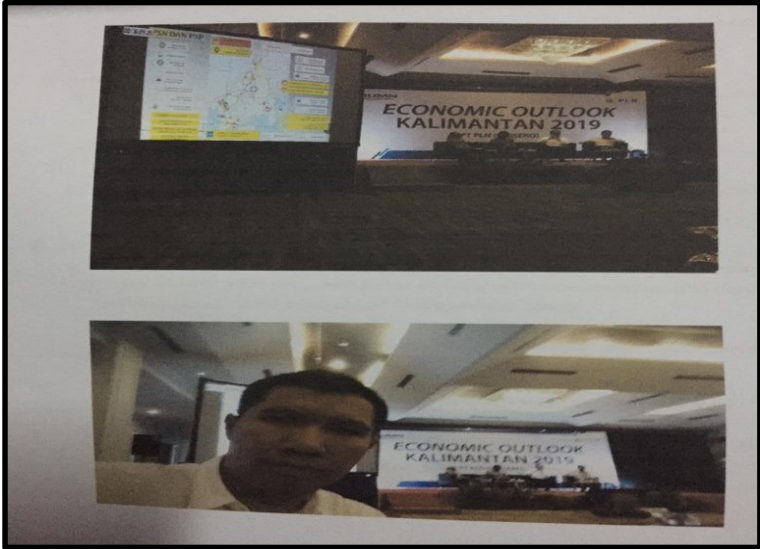
6.	<p>18 Juli 2018</p> <p>Kunjungan ke Dusun Tias Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam rangka penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat 40 kWp</p>		<p>Dokumentasi bersama warga di Dusun Tias Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan</p>
7.	<p>26 – 27 Juli</p> <p>Mendampingi konsultan perencanaan dalam rangka penyusunan FS-DED PLTS Terpusat Dusun Batologa, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan</p>		<p>Dokumentasi di salah satu rumah Dusun Batologa, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dalam rangka penyusunan FS-DED PLTS Terpusat</p>

8.	<p>18 Agustus 2018</p> <p>Kunjungan ke Dusun Tias Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam rangka penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat 40 kWP</p>		<p>Dokumentasi bersama warga Dusun Tias Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan dalam rangka penyerahan lokasi pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat 40 kWP</p>
9.	<p>29 – 31 Agustus</p> <p>Survey Desa calon penerimaan lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara</p>		<p>Dokumentasi di Kantor BAPPEDA DAN LITBANG Kabupaten Tana Tidung</p>

10.	<p>9-11 Agustus 2018</p> <p>Monitoring lapangan pembanguna PLTS Terpusat 40 kWP di Dusun Tias Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Ukuran dan kondisi Tiang ulin untuk kontruksi panggung 2. Beberapa tongkat/tiang ulin merupakan kayu yang rusak
11.	<p>23 - 25 Agustus 2018</p> <p>Survey Desa calon penerima Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kecamatan Peso dan Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara</p>		<p>Dokumentasi dirumah Kepala Desa dalam rangka Survey Desa calon penerima Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kecamatan Peso dan Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara</p>

12.	<p>5 - 7 September 2018</p> <p>Survey Desa calon penerima Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara</p>		<p>Dokumentasi rumah salah satu calon penerima Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara</p>
13.	<p>6 - 8 November 2018</p> <p>Pendampingan / Witness Uji Laik Operasi Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Milik PT. Mandiri Inti Perkasa abupaten Tana Tidung Yang Dilaksanakan Oleh PT. Sucofindo (Perseo) di Kabupaten Tana Tidung</p>		<p>Dokumentasi salah satu kondisi Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Milik PT. Mandiri Inti Perkasa abupaten Tana Tidung Yang Dilaksanakan Oleh PT. Sucofindo (Perseo) di Kabupaten Tana Tidung</p>

15.	<p>16 - 20 April 2018</p> <p>Koordinasi dan konsultasi ke Pengembangan Prinsip Konservasi Energi pada pusat penelitian dan pengembangan teknologi Energi Baru Terbarukan “Baron Techno Park (BTP) di Yogyakarta dan Koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi dan Sumber Daya Mineral di Yogyakarta</p>	 <p>Gambar Jam Matahari</p> <p>Konsultasi dg Kasubbid. Pengelolaan BTP</p> <p>Gambar Ruang Baterai</p> <p>Gambar Alur Fuel Cell System</p>	<p>Dokumentasi Gambar PLTS dan Monitor System Baron Techno dan konsultasi dengan Kasubag Pengelolaan BTP</p>
16.	<p>01 - 04 Mei 2018</p> <p>Koordinasi dan Konsultasi ke Dewan Energi Nasional di Jakarta dalam rangka penyelesaian akhir dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Persiapan rencana kunjungan Sekjend DEN ke Provinsi Kalimantan Utara</p>		<p>Dokumentasi Koordinasi dan Konsultasi ke Dewan Energi Nasional di Jakarta dalam rangka penyelesaian akhir dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Persiapan rencana kunjungan Sekjend DEN ke Provinsi Kalimantan Utara</p>

17.	<p>01- 04 Juli 2018</p> <p>Untuk mengetahui dan memahami petunjuk pengaadaan barang dan jasa pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Provinsi Kalimantan Utara</p>		
18.	<p>3 - 5 Juli 2018</p> <p>Menghadiri acara Economic Outlook Kalimantan 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur</p>		<p>Dokumentasi acara Economic Outlook Kalimantan 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur</p>

Program : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
 Kegiatan : Penyusunan FS dan DED Pengembangan Energi Baru Terbarukan
 Kode Rekening : 3 . 05 . 01 . 01 . 17 . 19

No.	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
	27 - 30 Maret 2018 Pelaksanaan survey harga material untuk penyusunan HPS pembangunan PLTS terpusat 40 kWP Dusun Tias di Bandung dan Jakarta		Dokumentasi Pelaksanaan survey harga material untuk penyusunan HPS pembangunan PLTS terpusat 40 kWP Dusun Tias di Bandung dan Jakarta



**Kepala Bidang
Energi dan Ketenagalistrikan ,**



Yosua Batara Payangan, ST, M.Si
 Pembina / IVa
 NIP. 19790127 200312 1 005

TABEL DOKUMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Kode Rekening : 3.05.3.05.01.17.07

No	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1	Penyusunan Rencana Umum Ketenagaan Listrik Daerah (RUKD) Provinsi Kalimantan Utara		Konsultasi dan pengambilan data ke PT. PLN ULK Tarakan dan PT. Rayon Malinau untuk penyusunan RUKD 2018 - 2038 Provinsi Kalimantan Utara
			Konsultasi Ke Dewan Energi Nasional Tentang Pembuatan RUED 2018-2050 dan Koordinasi serta Konsultasi konsumsi BBM di Provinsi Kalimantan Utara guna kebutuhan data RUED di Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas di Jakarta

			<p>Konsultasi ke DIREKTORAT Jenderal Ketenagalistrikan tentang Pembuatan RUKD 2018-2038 dan ke Dewan Energi Nasional Tentang pembuatan RUED 2018-2050</p>
			<p>Melakukan pengumpulan Data ke Instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Umum Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Utara di Tarakan dan Nunukan</p>





Mendampingi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka Konsultasi dan Kordinasi terkait Raperda RUED Provinsi Kalimantan Utara di Dewan Energi Nasional di Jakarta

TABEL DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN







Program : 3.05. 3.05.01. 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bidang geologi dan Air Tanah

No.	Uraian Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan Gambar
1	Dari hasil pengamatan di lapangan dalam rangka pengecekan indikasi gas dari pengeboran air sumur air tanah, maka hasil pengamatan dilaporkan untuk ditindaklanjuti oleh tim dari Badan Geologi Bandung.		Mendampingi tim dari Badan Geologi Bandung dalam rangka pengecekan indikasi gas dari pengeboran sumur bor air tanah, di KM. 58 Dusun Batu Laga Kec. Tg. Palas Timur
2	Untuk pelaksanaan pembangunan bantuan sumur bor tanah sebanyak 12 titik yang tersebar di wilayah Kalimantan Utara untuk saat ini sedang dalam proses pelelangan. Dalam kegiatan pengadaan sumur bor pada tahun anggaran 2017 direncanakan 5 titik namun hanya 3 titik yang dapat dibangun yaitu di Kabupaten Bulungan 2 titik dan Kabupaten Nunukan 1 titik. Untuk penyerahaan aset tersebut akan diserahkan ke Kabupaten dan Kabupaten akan menyerahkan ke masyarakat selaku pengguna. Untuk tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan 12 titik sumur bor untuk daerah pedalaman, perbatasan serta daerah yang belum teraliri air bersih dari air PDAM. Untuk koordinasi ke Pusdiklat Tekmira bertemu dengan Kepala Subbidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informasi Bpk.Suherman Resmana. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa untuk kegiatan diklat pengusahaan air tanah di tahun 2018 pada anggaran APBN tidak ada. Pada tahun 2018 pusdiklat tek mira akan diganti menjadi Badan Layanan Umum bertujuan untuk peningkatan PNB dan Badan Layanan Umum ini dapat mengadakan pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah apabila akan dilakukan kegiatan.		Koordinasi mengenai tindak lanjut bantuan sumur bor 12 titik TA. 2018 dari Badan Geologi Bandung dan pengajuan usulan bantuan sumur bor dalam TA. 2019 serta konsultasi mengenai keikutsertaan dalam diklat 2018 di Pusdiklat Minerba Bandung

3	<p>Tindak lanjut dari Perwali (Peraturan Walikota) Tarakan mengenai Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dimana Draft yang diajukan adalah sama dengan Pergub Kaltara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu Harga air baku sebesar Rp.1.250 /m3 . Draft Perwali Tarakan sampai saat ini sudah dalam tahap penyelesaian dan sudah disetujui oleh semua Pihak yang Berwenang tinggal menunggu perbaikan draft dari bagian Hukum Kota Tarakan serta pengesahan dan penerbitannya dari Walikota Tarakan. b) Perbandingan antara Perwali nomor 8 tahun 2011 dengan Perwali revisi tahun 2017 terletak pada harga air baku. Dimana Harga air baku mengikuti pergub nomor 15 tahun 2016 tentang nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah di wilayah provinsi Kalimantan utara dengan Harga air baku Rp.1.250/m3 .</p>		<p>Konfirmasi/koordinasi ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah tarakan mengenai tindak lanjut Perwali (Peraturan Walikota) pajak daerah dari sektor air tanah Kota Tarakan.</p>
4	<p>Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Lokasi Permohonan Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an. CV. Tirta Alam dengan alamat Jl. Diponegoro RT.20 RW.07 Kel.Sebengkok Tarakan Tengah. Tujuan Penggunaan Air Tanah adalah untuk Usaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Jumlah Sumur Bor yang diajukan oleh CV.Tirta Alam adalah 2 (dua) titik dan ternyata di lapangan terdapat 3 (tiga) titik yang digunakan. Rencana perkiraan pemakaian air 30 m3/hari. Kelengkapan berkas sudah lengkap hanya saja untuk Izin lingkungan UKL/SPPL masih dalam tahap proses di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Pemeriksaan Lokasi Perpanjangan Izin SIPA an. PT.Bonanza Pratama Abadi yang bertempat di Jl.P.Aji Iskandar RT.16 Juata Laut Kota Tarakan. Tujuan Penggunaan Air Tanah Kebutuhan Operasional Perusahaan Industri Pembekuan Ikan, Udang dan Biota Perairan Lainnya. Dengan Jumlah Sumur Bor yang diajukan oleh PT.Bonanza Pratama Abadi adalah 1 (satu) titik , pada SIPA sebelumnya tertulis bahwa kedalaman sumur sedalam 11m tapi setelah dilakukan pemeriksaan kembali ternyata info dari teknisi lapangan PT.Bonanza Pratama Abadi bahwa kedalaman sumur adalah 80m dengan panjang daya hisap Sumur Bor adalah 32m dan debit air sebesar 1,477 lt/detik. Perhitungan debit air pada Bank Indonesia Kota Tarakan adalah sebesar 1 lt/detik dan untuk kelengkapan berkas yang kurang sebelumnya yaitu Surat Izin lingkungan atau SPPL sudah diserahkan oleh BI pada saat Tim ke lokasi pada tanggal 22 Februari 2018 dan siap untuk segera diproses atau diterbitkan SIPA an. Bank Indonesia tersebut..</p>		<p>Peninjauan lokasi permohonan izin SIPA an. CV. Tirta Alam dan perpanjangan SIPA an. PT. Bonanza Pratama Abadi, serta perhitungan debit air untuk penetapan pajak air tanah Bank Indonesia Kota Tarakan.</p>

5	<p>Pemeriksaan Lokasi izin air permukaan an.CV.Mitra Pratama sebagai berikut : 1. Lokasi titik bor CV.Mitra Pratama berada di Tanjung Batu dengan memiliki 2 titik sumur bor, pada koordinat titik bor 1 : X : 571253, Y : 358600. Titik bor 2 : X :571265, Y: 358589. 2. Debit masing-masing pompa pada sumur bor sebesar 0,9 liter/detik dengan lama pemakaian rata-rata 3 jam. Pemanfaata air tanah akan digunakan untuk usaha Air Minum Dalam Kemasan. Lokasi tersebut berada di bawah kaki bukit yang masih ditumbuhi pepohonan. Untuk pendataan penghitungan pemakaian air permukaan di Tarakan dilakukan ke beberapa perusahaan yaitu PT. Idec Abadi Wood, PT. Intraca Mfg, PDAM Tirta Dharma Tarakan, PT. Pertamina EP 5 Tarakan.</p>	 <p>The top row contains two photographs: the left one shows a group of people in a meeting room with a red tablecloth, and the right one shows a similar meeting from a different angle. The bottom row contains two photographs: the left one shows two men working with a large metal drum and a hose, and the right one shows a white building with a blue roof.</p>	<p>Pemeriksaan lokasi permohonan izin pengambilan air tanah (SIPA) an. CV. Mitra Pratama dan pendataan penghitungan pemakaian air permukaan di Tarakan.</p>
6	<p>Dari hasil koordinasi ke KTT diketahui bahwa surat Badan Geologi yang ditujukan ke Bupati Tana Tidung telah di terima dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi ke pihak desa. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sangat mengapresiasi dengan adanya bantuan sumur bor air bersih ini dan kedepannya apabila ada yang diperlukan terkait masalah administrasi pendukung, pihak Kabupaten Tana Tidung siap melengkapinya. 4. Disampaikan oleh Kepala Desa Sepala Dalung Bapak Miswanto, S.Sos bahwa pihak desa siap memberikan tanah hibah untuk kepentingan sumur bor air bersih, dan dalam pelaksanaannya nanti pihak desa berencana akan menyiapkan 3 (tiga) lokasi yang dapat menjadi pilihan pihak pelaksana kegiatan sebagai pilihan, dan diharapkan salah satu dari tiga lokasi tersebut setelah dilakukan kegiatan geolistrik nanti dapat ditemukan potensi air bersih yang dapat diproduksi untuk kepentingan umum.</p>	 <p>The top row contains two photographs: the left one shows two men in uniform standing in front of a blue building with a sign that reads 'KANTOR DESA SEPALA DALUNG', and the right one shows a view of a green field with a white building in the background. The bottom row contains two photographs: the left one shows a meeting in a room with a green wall, and the right one shows another view of the green field with a white building.</p>	<p>Koordinasi mengenai rencana titik lokasi bantuan sumur bor dalam TA. 2018 dari Badan Geologi Bandung di KTT</p>

7	<p>Dari hasil koordinasi ke Bappeda Kota Tarakan diketahui bahwa pihak Badan Geologi Bandung sudah mengkoordinasikan perihal bantuan sumur bor sebanyak 2 kali. Dari usulan Badan Geologi Bandung untuk penempatan bantuan sumur bor adalah daerah Karang Anyar Kec. Tarakan Barat. Namun usulan ini dinilai kurang tepat sasaran karena daerah tersebut mendapatkan sarana air bersih dari PDAM. Sehingga Pemkot Kota Tarakan melalui Bappeda Kota Tarakan mengajukan alternatif untuk pemindahan lokasi bantuan sumur bor yaitu di daerah Kelurahan Mamburungan Kec. Tarakan Timur atau Kelurahan Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat. Namun hingga bulan Mei 2018 belum didapatkan kepastian dari Badan Geologi mengenai rencana pemindahan lokasi bantuan sumur bor tersebut.</p>		<p>Koordinasi mengenai rencana titik bor lokasi bantuan sumur bor dalam TA. 2018 dari Badan Geologi Bandung di Kota Tarakan</p>
8	<p>Dari hasil pendataan di lapangan diketahui bahwa dari 10 pemegang izin air tanah terdapat 4 pengusaha yang sudah memiliki flow meter dan 6 lainnya belum memasang flow meter. Salah satu alasan dari pemegang izin yang belum memasang flow meter adalah karena menunggu pembagian flow meter gratis seperti yang pernah diutarakan dalam kegiatan sosialisasi di tahun 2016. Di samping itu, pemegang izin mengeluhkan tentang tingginya nilai pajak yang harus dibayar dan dianggap tidak sesuai dengan penjualan air yang mereka dapatkan.</p>		<p>Pengecekan dan pendataan flow meter pada pengguna izin sumur bor di Kecamatan Tarakan Barat</p>

9	<p>Dari hasil pendataan di lapangan diketahui bahwa dari 10 pemegang izin air tanah terdapat 4 pengusaha yang sudah memiliki flow meter dan 6 lainnya belum memasang flow meter. Salah satu alasan dari pemegang izin yang belum memasang flow meter adalah karena menunggu pembagian flow meter gratis seperti yang pernah diutarakan dalam kegiatan sosialisasi di tahun 2016. Di samping itu, pemegang izin mengeluhkan tentang tingginya nilai pajak yang harus dibayar dan dianggap tidak sesuai dengan penjualan air yang mereka dapatkan.</p>	   	<p>Pengecekan dan pendataan flow meter pada pengguna izin sumur bor di Kecamatan Tarakan Tengah</p>
10	<p>Untuk kegiatan Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an.CV.Sedayu Tujuh Berlian terdapat 4 titik sumur bor dangkal. Lokasi titik bor merupakan pengeboran sumur dangkal dengan kondisi geohidrologi lokasi merupakan zonasi potensi air tanah sedang yang ditandai lokasi berada di kaki bukit. Selama beroperasi 4 titik pengeboran tersebut belum mengalami kekeringan namun debit mengalami penurunan di saat musim kemarau yang panjang. Hingga saat ini kondisi air baku untuk Air Minum Dalam Kemasan tidak mengalami pencemaran di tandai dengan hasil uji Lab Dinkes Kota Tarakan yang menyatakan tetap layak untuk dikonsumsi. Untuk Perpanjangan izin SIPA an.CV.Sedayu Tujuh Berlian dapat diproses lebih lanjut dan disarankan agar dibuat biopori /sumur resapan di dekat sumur bor agar keberlangsungan sumber air baku dapat terjaga dan di pasang flow meter PT Intracawood Manufacturing memiliki 3 titik sumur dalam namun 2 titik sumur bor sudah ditutup dikarenakan ke dua titik sumur tersebut tidak dapat mengeluarkan air lagi (kering). PT Intracawood Manufacturing disarankan agar dipasang flow meter mengingat volume air yang diambil cukup besar dan perhitungan pajak air tanah berdasarkan ketetapan jam nyala mesin perhari walaupun ada hari yang tidak dinyalakan (dihidupkan mesinnya)</p>	  	<p>Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin pengambilan air tanah an. CV. Sedayu Tujuh berlian dan pengecekan jumlah titik sumur bor pada PT. Intracawood Manufacturing di Kota Tarakan.</p>

11	<p>Identifikasi dan koordinasi tentang gerakan tanah (tanah longsor) poros Jalan berau-Tanjung Selor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur</p>		<p>Identifikasi dan koordinasi tentang gerakan tanah (tanah longsor) poros Jalan berau-Tanjung Selor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur</p>
12	<p>Untuk kegiatan Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an.PT PLN Tarakan dengan 1(satu) titik sumur dalam dengan koordinat :X : 566 290, Y: 365 175. Lokasi titik bor merupakan pengeboran sumur dalam dengan kedalaman sumur mencapai 50 meter dengan kondisi geohidrologi lokasi merupakan zonasi potensi air tanah sedang rendah yang ditandai lokasi berada di kaki bukit yang masih di tumbuh vegetasi. Selama beroperasi belum mengalami kekeringan dan sering dilakukan maintenance sumurnya. Hingga saat ini kondisi air baku hanya untuk keperluan mesin-mesin pembangkit dan tidak diperkenankan untuk konsumsi air minum (jika untuk keperluan air minum maka perlu dilakukan pengolahan air). Hasil dari uji lab,air tanah tersebut mengandung unsur Fe cukup tinggi sekitar 2,17 dengan PH 5,5. Pihak PT PLN Tarakan telah melakukan konservasi air tanah dengan membuat sumur resapan dan vegetasi di sekitar bukit. Untuk Perpanjangan izin SIPA an.PT PLN Tarakan dapat di proses lebih lanjut</p>		<p>Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin pengambilan air bawah tanah ke PT. PLN Tarakan</p>

13	<p>Untuk kegiatan Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) an.PT Sumber Kalimantan Abadi Tarakan dengan 2 (dua) titik sumur dalam dengan koordinat : Sumur I : X : 570 218, Y: 358 496 dan Sumur II : X : 570 344 , Y : 351 537. Debit Maksimum perhari yang diberikan untuk Sumur I : 56,7 M3/hari. Sumur II : 22,5 M3/hari. Lokasi titik bor merupakan pengeboran sumur dalam dengan kedalaman sumur mencapai 80 meter dengan Lokasi titik bor I berada dibawah kaki bukit dengan debit 2,25 liter/detik dan lokasi bor ke II 1 liter/detik lokasi termasuk zona potensi air sedang dengan litologi lempung,pasir. Lokasi titik bor I & II belum mengalami dry/kering. Peruntukan air tanah untuk bahan baku pembekuan udang dan kebutuhan air bersih karyawan (mess). Perpanjangan SIPA dapat diproses lebih lanjut</p>		<p>Pemeriksaan lokasi permohonan perpanjangan izin pengambilan air tanah (SIPA) an. PT. Sumber Kalimantan Abadi Kota Tarakan</p>
14	<p>Koordinasi dilaksanakan di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar , disambut oleh Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah yaitu Ir. Selle Hafied,M.Si. c) Semua Permohonan Pengambilan Air Tanah (SIPA) , Permohonan Izin Pemboran Air Tanah (SIP) , Permohonan Surat Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah (SIPPAT) ditujukan ke Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sama seperti yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Setelah berkas masuk ke Dinas PMPTSP kemudian di serahkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Lapangan, kemudian dari Dinas ESDM mengeluarkan Rekomendasi Teknis dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, setelah itu diserahkan kembali ke Dinas PMPTSP untuk diterbitkan SK nya. Contoh berkas dari Dinas ESDM Prov. Sulawesi Selatan Terlampir sebagai tambahan masukan untuk regulasi pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Utara.</p>		<p>Koordinasi dan konsultasi regulasi pengelolaan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar</p>

15	<p>Rencana kegiatan peresmian sumur bor dilaksanakan pada bulan November 2018. Namun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara masih belum dapat memastikan tanggal acara kegiatan peresmian sumur bor karena harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak protokol dan dikomunikasikan kembali dengan pihak aparat Desa Bebatu. 5. Rencana undangan peresmian sumur bor sejumlah kurang lebih 300 orang. Yaitu dari Pemprov Kalimantan Utara, Bupati Kabupaten Tana Tidung, Camat Sesayap Hilir, aparat Desa Bebatu dan desa-desa di Kecamatan Sesayap Hilir, masyarakat Desa Bebatu serta beberapa instansi terkait di Kabupaten Tana Tidung.</p>		<p>Koordinasi mengenai rencana kegiatan peresmian sumur bor di Desa Bebatu Kec. Sesayap Hilir, KTT</p>
16	<p>Dari pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi terkait perhitungan serta mekanisme pemungutan pajak air permukaan khususnya PT Idec Awi dan PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, disampaikan hasilnya sebagai berikut : □ Untuk target pemungutan pajak air permukaan untuk triwulan III sudah mencapai 75%; □ Untuk perhitungan pajak air permukaan an. PT IDEC AWI dan PDAM Tirta Alam hingga tahun 2018 sudah ditetapkan dan sudah masuk dalam target di tahun 2018 maka perhitungan nilai perolehan air permukaan berdasarkan perhitungan manual (tetap) sehingga untuk nilai perolehan air permukaan yang sudah terpasang flow meter akan diterapkan di tahun 2019; □ Para objek pajak air permukaan harus segera dilunasi per tanggal 15 Oktober 2018; □ Dalam pemasangan flow meter harus disaksikan oleh tim teknis; □ Tim teknis akan diundang oleh BPRD UPT Kota Tarakan untuk melakukan peninjauan flow meter yang telah dipasang;</p>		<p>Menghadiri undangan rapat koordinasi terkait perhitungan serta mekanisme pemungutan pajak air permukaan khusus PDAM Tirta Alam Kota Tarakan</p>